

PENGADILAN TINGGI MANADO

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO





PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Manado meraih Predikat Unggul dalam Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Pengadilan Tinggi Manado (099312) meraih Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik s.d. Bulan November 2025 dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara





PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Manado sebagai Korwil Pengelolaan BMN dengan Kategori Terbaik I dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado



Pengadilan Tinggi Manado (099312) meraih Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik s.d. Semester I 2025 (Kategori Satuan Kerja Satuan Kerja dengan Pagu Sedang) dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pembinaan YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Pimpinan Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Manado



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketua Pengadilan Tinggi Manado menyampaikan urgensi pembaruan KUHP.

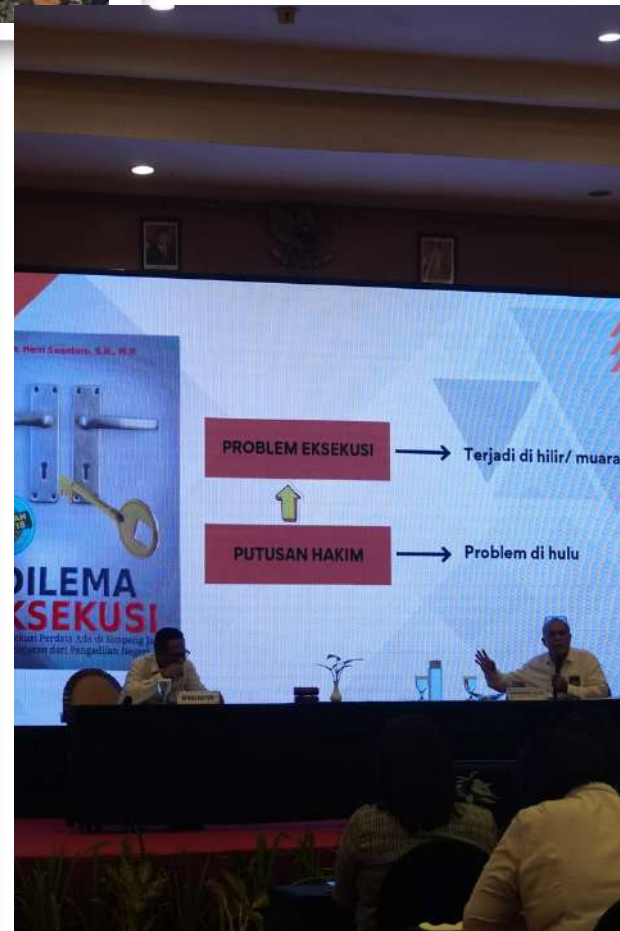




KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025



Rapat Koordinasi Percepatan
Penyelesaian Perkara Perdata Se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Manado





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pengawasan dan Pembinaan serta Penilaian AMPUH oleh Pengadilan Tinggi
Manado pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pengawasan dan Pembinaan serta Penilaian AMPUH oleh Pengadilan Tinggi
Manado pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Jabatan
pada Pengadilan Tinggi Manado





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Penandatanganan MOU dengan SLB YPAC dan SLB A GMIM
Bartemeus Manado untuk Peningkatan Layanan bagi
Penyandang Disabilitas





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan
Rapat Dinas Bulanan
Pengadilan Tinggi Manado





KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

Briefing Rutin bagi Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Manado



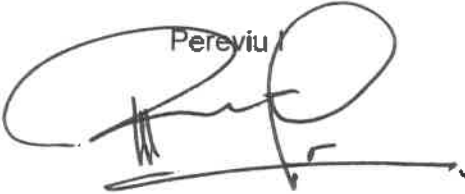


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, www.pt-manado.go.id, ptmanadomari@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Manado. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I


Heru Purwanto, S.Kom.



Manado, 27 Februari 2026

Pereviu II



Ronald Yau, S.T.

Pereviu III



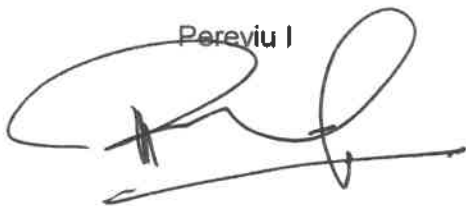
Retzi Yosia Lewu, S.T.,M.Kom.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓

	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Pereviu I



Heru Purwanto, S.Kom.



Manado, 27 Februari 2026

Pereviu II



Ronald Yau, S.T.

Pereviu III



Retzi Yosia Lewu, S.T.,M.Kom.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan tingkat banding di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Laporan kinerja ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta regulasi teknis yang mengatur perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini memuat perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta analisis atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Upaya penguatan manajemen perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan tata kelola organisasi memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis yang telah dirumuskan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa target kinerja secara umum dapat dipenuhi.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Manado atas komitmen dan kinerja yang telah ditunjukkan sepanjang Tahun 2025. Sinergi dan integritas seluruh jajaran menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Manado, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Amin Sutikno, S.H.M.H.



Laporan ini tidak hanya menyajikan data capaian, tetapi juga memuat analisis atas faktor pendukung, kendala, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan kinerja ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif dan dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Revisi Perjanjian Kinerja berhasil tercapai dan sebagian besar melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola manajemen peradilan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, penguatan integritas aparatur, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern” menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Persentase penyelesaian perkara perdata, pidana, dan tipikor secara tepat waktu mencapai 100 persen dan melampaui target yang ditetapkan. Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju juga terlaksana tepat waktu secara konsisten. Seluruh putusan telah diunggah ke direktori putusan sesuai ketentuan, serta pemanfaatan aplikasi *e-Court* dan *e-Berpadu* terus meningkat.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang melampaui target. Nilai kepuasan pengguna layanan berada di atas standar yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Manado telah dirasakan secara nyata oleh para pengguna layanan.

Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” juga menunjukkan hasil yang positif. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Manado berada dalam kategori Sedang, sebuah awal yang baik, masih ada ruang pertumbuhan khususnya pada aspek kompetensi, untuk mencapai IP ASN kategori tinggi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berada pada kategori sangat baik, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta Indeks Pengelolaan Aset juga tercapai sesuai target, menandakan bahwa tata kelola sumber daya mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berikut dipaparkan rincian capaian indikator kinerja utama sebagai wujud transparansi dan komitmen Pengadilan Tinggi Manado kepada publik:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	100%	102,04%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,09%
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	99,52%	102,60%
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	78,36%	101,77%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 1)					102,73%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,87	107,43%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 2)					107,43%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	77,33	108,92%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	105,26%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	95,75	122,75%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,67%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 3)					114,90%
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran					108.35%

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. ISU STRATEGIS	7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA	24
1. Sasaran Strategis : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	27
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	42
3. Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	46
B. REALISASI ANGGARAN	58
DIPA (01)	58
DIPA (03)	61
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado	64
BAB IV PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	68
B. REKOMENDASI	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado	5
Gambar III.1. Rekapitan Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	28
Grafik III.2. Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2025	32
Grafik III.3. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025	35
Grafik III.4. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025	37
Grafik III.5. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025	40
Grafik III.6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	43
Grafik III.7. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025	60
Grafik III.8. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025	61

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Manado	4
Tabel I.2. Uraian Tugas Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado	6
Tabel I.3. Isu Strategis dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 ..	9
Tabel II. 1. Sasaran Strategis 1	14
Tabel II. 2. Sasaran Strategis 2	14
Tabel II. 3. Sasaran Strategis 3	15
Tabel II. 4. Matriks Kinerja dan Pendanaan	17
Tabel II.5. Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	18
Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	19
Tabel II.7. Capaian Kinerja Akumulasi Januari-September Tahun 2025	20
Tabel II.8. Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	22
Tabel III.1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	25
Tabel III.2. Normalisasi Capaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	26

Tabel III.3. Jumlah Perkara yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025	28
Tabel III.4. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	29
Tabel III.5. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	30
Tabel III.6. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Pengaju Tahun 2025	32
Tabel III.7. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	33
Tabel III.8. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	33
Tabel III.9. Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025	35
Tabel III.10. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	36
Tabel III.11. Perbandingan Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	36
Tabel III.12. Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025	37
Tabel III.13. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Court	38
Tabel III.14. Perbandingan Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	38
Tabel III.15. Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025	40
Tabel III.16. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Berpadu	41
Tabel III.17. Perbandingan Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	41
Tabel III.18. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025 .	43
Tabel III.19. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	44
Tabel III.20. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	44
Tabel III.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	45

Tabel III.22. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	
Satuan Kerja Pengadilan	47
Tabel III.23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	
Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	47
Tabel III.24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
Satuan Kerja Pengadilan	49
Tabel III.25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	49
Tabel III.26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	51
Tabel III.27. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	51
Tabel III.28. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	52
Tabel III.29. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	53
Tabel III.30. Efisiensi Sumber Daya Anggaran	57
Tabel III.31. Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun 2025	59
Tabel III.32. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (01) Tahun Anggaran 2025	60
Tabel III.33. Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ..	60
Tabel III.34. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (03) Tahun Anggaran 2025	61
Tabel III.35. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ..	61
Tabel III.36. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado	64

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Manado adalah peradilan di lingkungan Peradilan Umum, sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding dari Pengadilan Negeri di Sulawesi Utara.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 51

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung”, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penguatan integritas dan percepatan transformasi peradilan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV serta Lampiran



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Manado adalah peradilan di lingkungan Peradilan Umum, sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding dari Pengadilan Negeri di Sulawesi Utara. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado meliputi seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara yang terbagi dalam 15 Kabupaten/Kota.

Pengadilan Tinggi Manado membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Manado, meliputi Kota Manado dan sebagian Minahasa;
2. Pengadilan Negeri Bitung, meliputi Kota Bitung;
3. Pengadilan Negeri Tondano, meliputi Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara;
4. Pengadilan Negeri Tahuna, wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang & Biaro);
5. Pengadilan Negeri Kotamobagu, meliputi Kabupaten Bolaang Mongondouw, Kabupaten Bolaang Mangondouw Utara, Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur, Kabupaten Bolaang Mangondouw Selatan dan Kota Kotamobagu;
6. Pengadilan Negeri Airmadidi, meliputi Kabupaten Minahasa Utara;
7. Pengadilan Negeri Amurang, meliputi Kabupaten Minahasa Selatan; dan
8. Pengadilan Negeri Melonguane, meliputi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pengadilan Tinggi Manado senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu

memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance*. Untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good*

governance), salah satu kewajiban Pengadilan Tinggi Manado adalah melaksanakan asas akuntabilitas melalui pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis berpedoman pada :

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya; dan
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029;

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT.01.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 merupakan suatu sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Manado dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 51.

TUGAS PENGADILAN TINGGI	FUNGSI PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding;	Fungsi Mengadili (<i>Judicial Power</i>), yakni memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi; Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;	Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya pengadilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.	Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Tabel I.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Manado

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado

Berikut uraian tugas masing – masing jabatan tersebut :

Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal pelaksanaan tupoksi Pengadilan. Apabila Ketua berhalangan maka secara otomatis Wakil Ketua bertindak melaksanakan fungsi Ketua. Wakil Ketua juga melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.

Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti. **Bagian Perencanaan & Bagian Umum & Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, program, anggaran, keamanan, keprotokolan, kepegawaian, organisasi, perpustakaan, pengelolaan keuangan, dan tata laksana, serta pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi serta penyusunan laporan. informasi.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.	Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	Sub Bagian Kepegawaian & TI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan
Panitera Muda Pidana Khusus (Tipikor) bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.	Sub Bagian Keuangan & Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	Pranata Komputer mempunyai tugas untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	Analisis Pengelola Keuangan APBN bertugas melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.
Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	Pranata Keuangan APBN bertugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.	

Tabel I.2. Uraian Tugas Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung”, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penguatan integritas dan percepatan transformasi peradilan. Pengadilan Tinggi Manado menyadari bahwa dinamika hukum dan harapan masyarakat terhadap keadilan yang cepat, biaya ringan, dan transparan menuntut langkah-langkah strategis yang lebih adaptif dan terukur. Selaras dengan misi untuk menjaga kemandirian badan peradilan dan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, isu strategis tahun 2025 dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan modernisasi birokrasi. Fokus utama terletak pada penguatan teknis penyelesaian perkara, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi pelayanan publik, penjaminan mutu melalui Sertifikasi AMPUH, serta komitmen dalam Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM).

Implementasi kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan manifestasi dari dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Manado untuk menghadirkan institusi peradilan yang tidak hanya tangguh secara hukum, tetapi juga bersih dari praktik korupsi dan melayani dengan hati. Seluruh rangkaian isu strategis berikut ini merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi Pengadilan Tinggi Manado dan seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk mencapai standar mutu peradilan yang unggul dan terpercaya.

Isu Strategis	Kebijakan
Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Peningkatan Rasio Penanganan perkara melalui implementasi Register Elektronik untuk percepatan penyelesaian perkara perdata yang dimohonkan banding melalui e-Court (Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 1 Tahun 2025) dan perkara pidana/tipikor melalui <i>e-Berpadu</i>, kecuali untuk perkara – perkara yang belum terakomodir secara elektronik, sebagaimana surat izin penggunaan register elektronik yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilum Nomor 1493/DJUT1.1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023. 2. Pengiriman Salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju secara elektronik pada hari yang sama dengan pengucapan putusan. 3. Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara; 4. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin pada unit yang diawasi;

5. Pelaksanaan Rapat Berjenjang Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan diikuti oleh Para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta Staf Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado;
6. Monitoring dan evaluasi Kinerja Penyelesaian perkara, Rasio Penyelesaian perkara oleh Hakim dan Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPAPU dan EIS saat pelaksanaan Rapat Dinas Bulanan; dan
7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata dengan internal pengadilan maupun *stakeholder* lainnya seperti Organisasi Advokat, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenkumham.

Peningkatan Kompetensi Aparatur/ SDM

1. Mengusulkan nama – nama aparatur/SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi dan menyelenggarakan Bimtek dan/atau DDTK.
2. Peningkatan Kinerja melalui pembinaan dan pengawasan baik pada Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado; dan
3. Melaksanakan pengawasan bidang serta tindak lanjut atas temuan – temuan.

Peningkatan Pelayanan Publik

1. Optimalisasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi untuk layanan Penyumpahan Advokat, Layanan Informasi, Pengaduan serta menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat & Survei Persepsi Anti Korupsi untuk feedback dari *stakeholder*, pengguna layanan dan pengunjung pengadilan
2. Melaksanakan pelatihan bagi petugas PTSP yang bekerja sama dengan lembaga eksternal yaitu lembaga perbankan (Bank Rakyat Indonesia) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal interaksi dengan pengguna layanan;
3. Hakim Tinggi Pengawas PTSP melakukan pengawasan setiap hari;
4. Hakim Tinggi Pengawas PTSP, Pejabat Pengelola PTSP serta Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP melaksanakan pembinaan dan/atau *briefing* kepada Petugas PTSP setiap hari Senin pagi;

	5. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei IPAK dan IKM Pengadilan Tinggi Manado; 6. Publikasi Informasi, Standar dan Prosedur Layanan Pengadilan Tinggi Manado melalui website dan media sosial; dan 7. Menyediakan layanan dan petugas khusus untuk penyandang disabilitas dan kaum rentan
Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh	1. Mengikutsertakan seluruh Hakim Tinggi dan pegawai yang ditunjuk dalam Sertifikasi Asesor AMPUH yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; dan 2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen secara mandiri dan berkala sebelum asesmen resmi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilakukan, guna memastikan seluruh dokumen dan infrastruktur sesuai dengan standar sertifikasi AMPUH.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tabel 1.3. Isu Strategis dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Secara khusus pada subbab ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan juga pada Bab III ini.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1 . Perjanjian Kinerja
- 2 . Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen lembaga jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya.

Visi :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG"

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

C.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen lembaga jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado. Visi Pengadilan Tinggi Manado yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. Visi Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Manado sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang mencerminkan mandat utama Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado yaitu :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis menggambarkan hasil-hasil spesifik yang diharapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan strategis, serta menjadi dasar bagi perumusan indikator kinerja utama yang terukur dan realistis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern” mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.4.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dibagi jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan x 100%

Tabel II. 1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

			Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: - Pelayanan administrasi persidangan; - Pelayanan pengaduan; - Pelayanan permohonan informasi.
--	--	--	--

Tabel II. 2. Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 3 “Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional” menggambarkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Kualifikasi (25%) - Disiplin (5%) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

		Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Tabel II. 3. Sasaran Strategis 3

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung.

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Manado terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan indikator kinerja:
 - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan
- b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, dengan indikator kinerja:
 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan
 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan *e-Court*; dan
- Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*.

Program/ Kegiatan	Tujuan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Target					Target Jangka Menengah	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
		Pengadilan Tinggi Manado							21.783.562	22.446.919	44.319.948	45.000.000	45.000.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern											
		1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%	98%					
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	99%	99%	99%	99%	99%					
		1.3. Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	97%	98%	98%	99%	99%					
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	97%	98%	98%	99%	99%					
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	94%	94%	95%	95%	95%					
Program Dukungan Manajemen		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik											
		2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,64	3,64	3,68	3,68	3,68					
	2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
		3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	72	72	73	73	73					
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	96	96	97	97					
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	90	90	91	91	91					
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,45	3,45	3,60	3,60						

Tabel II. 4. Matriks Kinerja dan Pendanaan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*/) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, berikut kami sampaikan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%
		1.3.	Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%
		1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Tabel II.5. Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		c. Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		e. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.	376.452.000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.	16.806.723.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.	236.797.000,-

Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

Penyajian laporan pencapaian kinerja pada subbagian ini merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama periode sembilan bulan pertama tahun 2025, sebelum dilakukannya penyesuaian indikator kinerja utama dan target melalui Perubahan Perjanjian Kinerja. Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah tetap selaras dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado. Capaian ini juga merupakan cerminan dari komitmen seluruh lini pada Pengadilan Tinggi Manado dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja akumulatif periode Januari hingga September Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan performa yang baik. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem manajemen perkara dan komitmen tinggi aparat peradilan dalam memberikan layanan yang cepat dan akuntabel sebelum memasuki fase penyesuaian pada periode berikutnya.

Berikut capaian kinerja akumulasi Januari sampai dengan September Tahun 2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisas (Jan-Sept)	Capaian Akumula si	Keterangan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%	Tercapai
		b.Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%	Tercapai
		c.Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,16%	Tercapai
		d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	48,53%	121,32%	Tercapai
		e.Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	95,47%	106,07%	Tercapai
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	Tercapai
		b.Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%	100%	102,04%	Tercapai
		c.Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%	100%	102,04%	Tercapai

Tabel II.7. Capaian Kinerja Akumulasi Januari-September Tahun 2025

Pada sasaran “*Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel*”, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan hasil yang sangat baik:

1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara: Penyelesaian perkara baik Perdata, Pidana, dan Tipikor secara tepat waktu menunjukkan realisasi yang konsisten yaitu 100%. Komitmen tinggi dari pimpinan lewat kebijakan implementasi register elektronik mendorong terciptanya peningkatan rasio penyelesaian perkara, peningkatan kinerja, kepatuhan

majelis hakim dalam penanganan perkara, kepatuhan kepaniteraan dalam administrasi perkara serta kelengkapan data perkara dalam SIPP berkontribusi pada realisasi ini.

2. Kualitas Putusan: Capaian atas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding mencapai 121,32%. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim memiliki kualitas pertimbangan hukum yang kuat dan rasa keadilan yang tinggi, sehingga dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara. Selain itu, dengan lebih banyak perkara yang selesai di tingkat banding, kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud lebih cepat. Hal ini meminimalisir waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara maupun masyarakat dalam proses mencari keadilan.
3. Kepuasan Stakeholder: Kepercayaan publik yang diukur melampaui target dengan capaian 106,07%, mengindikasikan bahwa layanan peradilan telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan testimoni pengguna layanan dan pengunjung pengadilan

Sejalan dengan fungsi teknis, aspek pengelolaan administrasi penyelesaian perkara juga menunjukkan efektivitas yang maksimal. Sasaran *“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”* dengan indikator pengiriman salinan putusan untuk perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor ke pengadilan pengaju seluruhnya terealisasi tepat waktu (100%). Pencapaian akumulasi pada periode Januari hingga September menunjukkan performa yang sangat baik, membuktikan bahwa proses penanganan perkara telah berjalan dengan sangat responsif dan sistematis, dengan adanya sistem informasi terpadu.

Realisasi pengiriman salinan putusan perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor secara konsisten mencapai angka 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado mampu bekerja lebih cepat dari standar waktu minimal yang ditetapkan dalam SOP. Kecepatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju merupakan faktor kunci dalam memberikan kepastian hukum. Dengan diterimanya salinan putusan tepat waktu, para pihak dapat segera menentukan langkah hukum selanjutnya. Hal ini ditunjang oleh kebijakan pengiriman Salinan putusan secara elektronik di hari yang sama dengan pengucapan putusan.

Pada saat Salinan putusan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, pada saat itu juga Salinan putusan terkirim ke pengadilan negeri pengaju untuk selanjutnya diberitahukan kepada para pihak. Pencapaian ini juga mencerminkan tingginya disiplin dan sinergi antar unit, subbagian dan aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado. Kesadaran kolektif bahwa penyelesaian administrasi perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari integritas peradilan telah mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap instrumen akuntabilitas organisasi. Revisi Perjanjian Kinerja ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan target tahunan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang baru. Bersama ini disampaikan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di mana perubahan ini mencakup penyesuaian indikator kinerja utama dan target agar sejalan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 serta menjamin kesinambungan dan efektivitas pencapaian kinerja yang akuntabel.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%
		1.3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%
		1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 376.452.000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.239.588.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 167.522.000,-

Tabel II.8. Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2025. Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.



A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2025. Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Manado merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Mengawali periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, tahun 2025 menjadi momentum transformasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara khusus Pengadilan Tinggi Manado. Transformasi dirancang untuk menjawab tantangan penegakan hukum di era digital serta penguatan integritas birokrasi yang lebih kokoh. Dengan fokus pada peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta

penguatan kompetensi sumber daya manusia. Capaian kinerja yang tersaji dalam laporan ini merupakan manifestasi dari langkah awal Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan realitas kerja sehari – hari.

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025 dengan mencatatkan Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran sebesar 108,35%. Angka ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado tidak hanya memenuhi target, tetapi berhasil melampaui standar yang telah ditetapkan. Berikut dipaparkan rincian capaian indikator kinerja utama sebagai wujud transparansi dan komitmen Pengadilan Tinggi Manado kepada publik.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	100%	102,04%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,09%
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	99,52%	102,60%
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	78,36%	101,77%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 1)					102,73%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,87	107,43%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 2)					107,43%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	77,33	108,92%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	105,26%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	95,75	122,75%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,67%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 3)					114,90%
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran					108.35%

Tabel III.1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17%	104,17%	10%	93,75%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	100%	102,04%	102,04%	10%	91,84%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,09%	103,09%	10%	92,78%
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	99,52%	102,60%	102,60%	10%	92,34%
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	78,36%	101,77%	101,77%	10%	91,59%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,87	107,43%	107,43%	10%	96,69%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	77,33	108,92%	108,92%	10%	98,02%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	105,26%	105,26%	10%	94,74%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	95,75	122,75%	110%	10%	99%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,67%	110%	10%	99%
	Total Capaian PK (4)							949,75%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-Rata Capaian PK (5)							94,97%
	Predikat PKO (6)							BAIK

Tabel III.2. Normalisasi Capaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

Data capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja Pengadilan Tinggi Manado melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja > 110% yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 122,75% dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 122,67% sudah dilakukan normalisasi sebagaimana Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Setiap indikator dinilai dari realisasi terhadap target, kemudian dinormalisasi untuk mencegah anomali capaian di atas 110%. Hasil tersebut dikoreksi menggunakan faktor predikat akuntabilitas. Nilai akhir diperoleh dari rata rata capaian seluruh indikator. Rentang nilai 80% - 100% diklasifikasikan sebagai predikat Baik, yang berarti tingkat implementasi manajemen kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pengadilan Tinggi Manado berupaya memberikan pelayanan peradilan yang menjamin keadilan prosedural dan substantif melalui tata kelola yang terbuka, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama, seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara, percepatan pengiriman salinan putusan, peningkatan transparansi informasi perkara, serta optimalisasi penerapan sistem peradilan elektronik (*e-Court* dan *e-Berpadu*). Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai efektivitas administratif, tetapi juga mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Manado berhasil mengimplementasikan transformasi digital peradilan secara berkelanjutan.

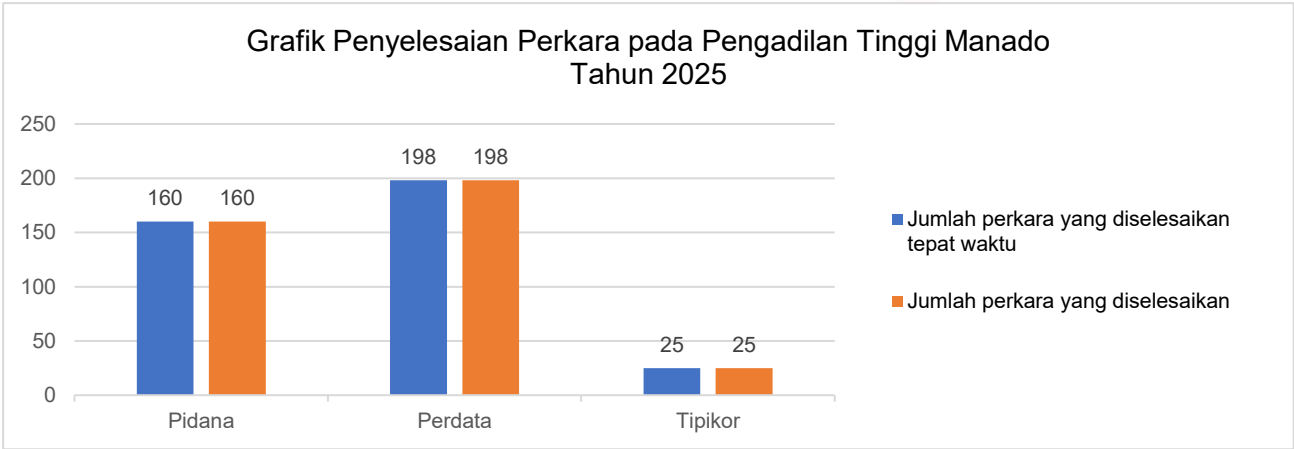
1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 perkara dan seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 96% sehingga capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 104,17%.**

Indikator Kinerja Utama			Bulan												Total	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	
	Jumlah perkara yang diselesaikan	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	

Tabel III.3. Jumlah Perkara yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025



Grafik III.1. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sampai dengan 2025 penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian setiap perkara.

Tahun		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	Perdata	185	185	100	100	100
	Pidana	126	126	100	100	100
	Tipikor	7	7	100	100	100
2023	Perdata	221	221	95	100	105,26
	Pidana	158	158	95	100	105,26
	Tipikor	27	27	95	100	105,26
2024	Perdata	207	207	95	100	105,26
	Pidana	171	171	95	100	105,26
	Tipikor	15	15	95	100	105,26
2025	Perdata	198	198	96	100	104,17
	Pidana	160	160			
	Tipikor	25	25			

Tabel III.4. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

1. Tahun 2022: Menjadi tahun dasar dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan penyelesaian total 318 perkara (Perdata: 185, Pidana: 126, Tipikor: 7), Pengadilan Tinggi Manado mencapai target secara sempurna (100%);
2. Tahun 2023 dan 2024: Meskipun target indikator disesuaikan menjadi 95%, realisasi tetap bertahan di angka 100%. Hal ini menghasilkan Capaian Kinerja sebesar 105,26%. Terjadi lonjakan signifikan pada perkara Tipikor di tahun 2023 (27 perkara) dibandingkan tahun sebelumnya; dan
3. Tahun 2025: Target ditingkatkan secara bertahap menjadi 96%, dengan total penyelesaian 383 perkara (Perdata: 198, Pidana: 160, Tipikor: 25), Pengadilan Tinggi Manado kembali mencatatkan realisasi 100% dengan tingkat Capaian Kinerja sebesar 104,17%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)	Target Jangka Menengah (%)
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	98

Tabel III.5. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Selisih positif sebesar 2% di atas target jangka menengah menunjukkan bahwa sistem manajemen perkara yang diterapkan telah berjalan sangat efektif. Keberhasilan mencapai angka 100% berarti tidak ada satu pun perkara yang penyelesaiannya melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau standar operasional prosedur (SOP).

Keberhasilan Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% baik perkara Perdata, Pidana, maupun Tipikor didukung oleh 3 (tiga) pilar utama:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan Penyelesaian setiap perkara diawali dengan Penetapan Majelis Hakim oleh KPT dilanjutkan dengan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera. Majelis Hakim berkewajiban menyusun rencana sidang dalam court calendar dan menetapkan jadwal sidang. Hal ini memastikan perencanaan pemeriksaan berkas perkara dan persidangan berjalan sesuai SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum.

b. Tahap Pelaksanaan

Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan komitmen tinggi terhadap penyelesaian perkara secara tepat waktu di mana seluruh perkara perdata dan pidana diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sesuai mandat SEMA Nomor 2 Tahun 2014, khusus untuk perkara Tindak Pidana Korupsi, penyelesaian dilakukan secara akseleratif dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari, selaras dengan amanat UU Nomor 31 Tahun 1999.

c. Tahap Pengawasan

Mekanisme kontrol dilakukan secara berlapis. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi, serta pemeriksaan rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Pengawasan teknis juga diperkuat dengan Rapat Berjenjang Kepaniteraan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan tinggi Manado untuk Kinerja Penyelesaian perkara, Rasio Penyelesaian perkara oleh Hakim dan

Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPAPU dan EIS saat pelaksanaan Rapat Dinas Bulanan.

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

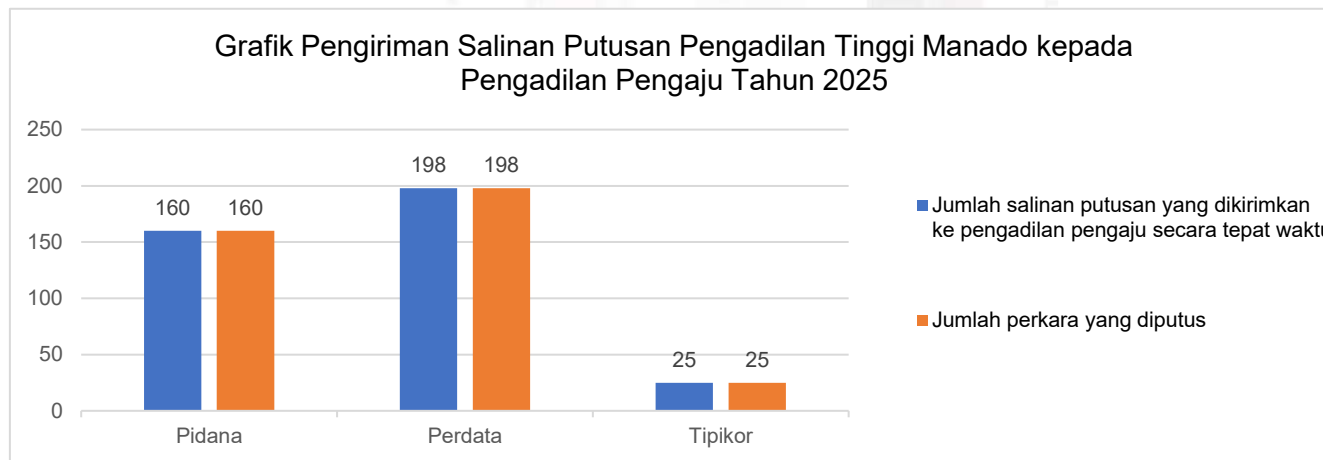
Indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); dan
- b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 perkara di mana seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu dan salinan putusan perkara tersebut dikirimkan secara tepat waktu oleh Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan Negeri pengaju. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 98% sehingga capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 102,04%.**

Indikator Kinerja Utama			Bulan												Total	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	
tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah perkara yang diputus	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	

Tabel III.6. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Pengaju Tahun 2025



Grafik III.2. Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sampai dengan 2025 pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan Pengaju selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian setiap perkara.

Tahun		Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diputus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	Perdata	185	185	100	100	100
	Pidana	126	126	100	100	100
	Tipikor	7	7	100	100	100
2023	Perdata	221	221	95	100	105,26
	Pidana	158	158	95	100	105,26
	Tipikor	27	27	95	100	105,26
2024	Perdata	207	207	95	100	105,26
	Pidana	171	171	95	100	105,26
	Tipikor	15	15	95	100	105,26
2025	Perdata	198	198	98	100	102,04
	Pidana	160	160			
	Tipikor	25	25			

Tabel III.7. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan tren performa yang sangat stabil dan konsisten dalam hal ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju. Selama empat tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Manado berhasil mempertahankan tingkat realisasi sebesar 100%, yang berarti seluruh perkara yang diputus telah dikirimkan salinannya secara tepat waktu.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)	Target Jangka Menengah (%)
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	99

Tabel III.8. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah untuk indikator "*Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu*" ditetapkan sebesar 99%. Akan tetapi pada realisasinya di tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado berhasil mencapai angka 100%. Capaian yang melampaui target jangka menengah ini memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Ketepatan waktu yang mencapai 100% memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di tingkat pengadilan pengaju, sehingga proses atau upaya hukum selanjutnya tidak terhambat oleh kendala administratif. Pencapaian realisasi 100% terhadap target 99% mencerminkan bahwa manajemen perkara dan koordinasi antar bagian telah berjalan dengan sangat efektif.

Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

Sejalan dengan penyelesaian perkara secara tepat waktu, Pengadilan Tinggi Manado juga berhasil mengirim salinan putusan secara tepat waktu kepada Pengadilan Pengaju pada tahun 2025 dan tahun – tahun sebelumnya. Hasil yang memuaskan ini merupakan sinergi berbagai faktor strategis sebagai berikut:

a. **Komitmen Kepemimpinan dan Pengawasan**

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pembuatan kebijakan dan monitoring evaluasi, di mana implementasi melalui pengawasan secara melekat lewat pemanfaatan aplikasi seperti SIPAPU dan EIS. Melalui rapat koordinasi rutin dan evaluasi bulanan, setiap kendala teknis yang belum dapat terselesaikan di tingkat bagian/subbagian dapat segera dicarikan solusinya. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) mendorong terciptanya budaya kerja yang responsif dan akuntabel di seluruh unit kerja.

b. **Peningkatan Integritas dan Kompetensi SDM**

Aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas administratif tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

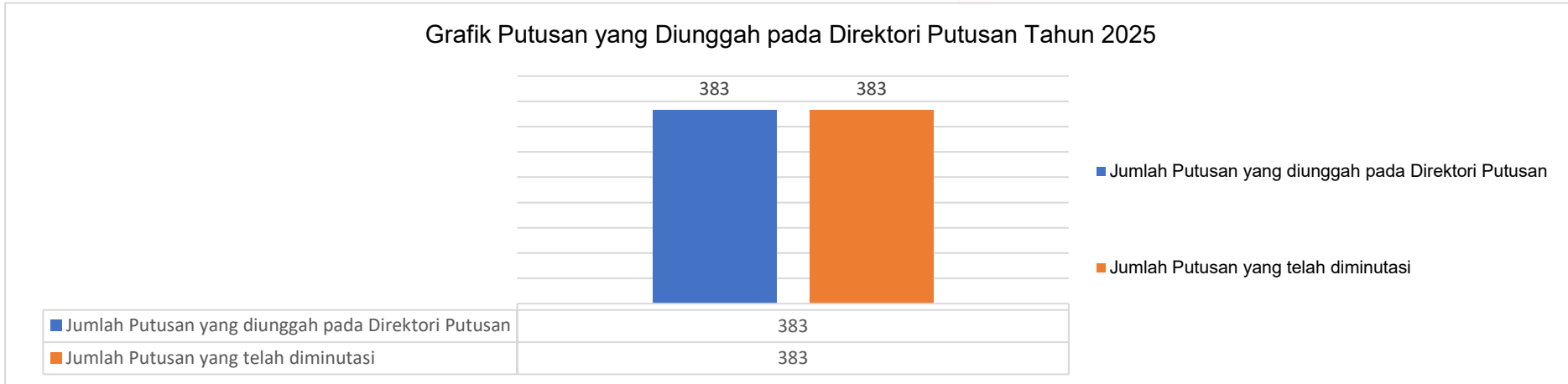
1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan" adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 perkara di mana seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu dan seluruh putusan perkara tersebut diunggah pada direktori putusan. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 97% sehingga capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 mencapai 103,09%.**

Indikator Kinerja Utama				Bulan												Total	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan	Pidana		18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata		4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor		5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	
	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Pidana		18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18	160	383
		Perdata		4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15	198	
		Tipikor		5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0	25	

Tabel III.9. Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025



Grafik III.3. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan	Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	383	383	97	100	103,09

Tabel III.10. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)	Target Jangka Menengah (%)
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	99

Tabel III.11. Perbandingan Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi sebesar 100% pada tahun pertama indikator ini diterapkan membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah siap sepenuhnya menuju digitalisasi sistem peradilan serta mempermudah akses masyarakat dalam mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado didukung dengan implementasi kebijakan *One Day Publish* yang telah diterapkan sejak lama yaitu dengan mengunggah putusan yang dilakukan segera setelah proses minutasi selesai, memastikan bahwa keadilan tidak hanya diputus di ruang sidang, tetapi juga dapat segera diketahui oleh para pencari keadilan maupun masyarakat luas.

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*” adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan *e-Court* dengan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-Court* dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2025 sebanyak 209 perkara di mana 208 perkara diajukan menggunakan *e-Court*. **Realisasi sebesar 99,52% dan melebihi target 97% sehingga capaian perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court* tahun 2025 mencapai 102,60%.**

Indikator Kinerja Utama		Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i>	14	9	14	19	18	14	26	7	21	30	18	18	208
	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan	14	9	14	19	18	14	26	7	22	30	18	18	209

Tabel III.12. Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025



Grafik III.4. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i>	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	208	209	97	99,52	102,60

Tabel III.13. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan *e-Court*

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)	Target Jangka Menengah (%)
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	99,52	99

Tabel III.14. Perbandingan Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi sebesar 99,52% pada tahun pertama indikator ini diterapkan membuktikan bahwa pemanfaatan layanan peradilan elektronik telah menjadi standar utama untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif, meskipun ada 1 (satu) perkara yang tidak berhasil diajukan secara *e-Court* karena ada gangguan massal pada sistem *e-Court* di hari terakhir pengajuan berkas banding. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Tinggi Manado memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel. Tentu saja, keberhasilan ini diawali dengan penguatan kompetensi aparaturnya peradilan yang secara berkelanjutan untuk memastikan kesiapan teknis dalam mengelola administrasi perkara berbasis elektronik.

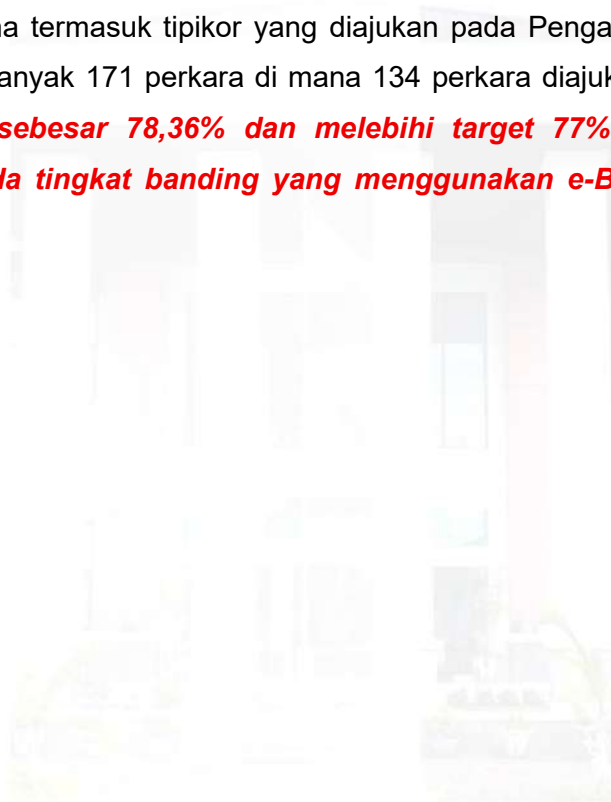
Langkah konkret selanjutnya dilakukan melalui kebijakan strategis pimpinan Pengadilan Tinggi Manado yang mewajibkan seluruh permohonan banding perdata diarahkan melalui *e-Court*, serta mendorong pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Utara untuk secara konsisten menginformasikan kepada seluruh pihak berperkara untuk melengkapi dan

menyediakan dokumen – dokumen pendukung pada waktu yang tidak terlalu dekat dengan batas waktu pengajuan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding.

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*

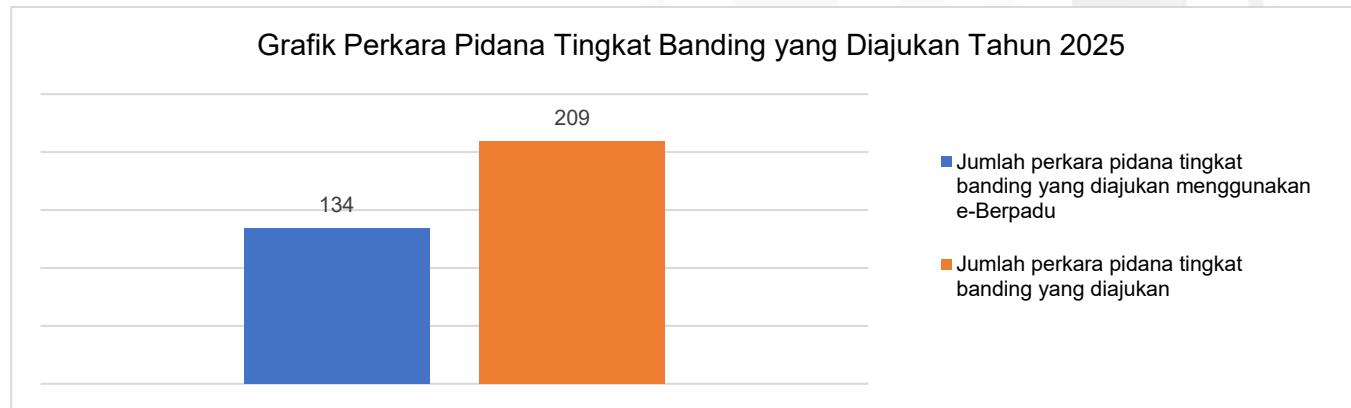
Indikator kinerja “Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*” adalah perbandingan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan *e-Berpadu* dengan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-Berpadu* dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Jumlah perkara pidana termasuk tipikor yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2025 sebanyak 171 perkara di mana 134 perkara diajukan menggunakan *e-Berpadu*. **Realisasi sebesar 78,36% dan melebihi target 77% sehingga capaian perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu* tahun 2025 mencapai 101,77%.**



Indikator Kinerja Utama			Bulan												Total	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Jumlah perkara pidana	Pidana	0	1	8	6	9	8	7	17	18	11	24	11	120	134
	tingkat banding yang diajukan	Tipikor	0	0	0	0	1	1	0	2	4	6	0	0	14	
	menggunakan e-Berpadu															
	Jumlah perkara pidana	Pidana	15	16	8	8	10	8	7	17	18	11	25	11	154	171
	tingkat banding yang diajukan	Tipikor	2	1	0	0	1	1	0	2	4	6	0	0	17	

Tabel III.15. Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025



Grafik III.5. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Berpadu</i>	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	134	171	77	78,36	101,77

Tabel III.16. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan *e-Berpadu*

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)	Target Jangka Menengah (%)
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	78,36	95

Tabel III.17. Perbandingan Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Berpadu* Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2025 belum semua perkara diajukan melalui *e-Berpadu* dikarenakan terdapat kategori perkara yang secara aturan belum dapat diakomodir dalam sistem *e-Berpadu* pada tingkat banding, misalnya perkara pidana perikanan. Selain itu, penyempurnaan sistem *e-Berpadu* oleh Mahkamah Agung untuk tingkat banding baru dilakukan di sekitar bulan Maret tahun 2025, sehingga dari total 171 perkara, hanya 134 perkara yang diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Manado yang dapat diproses dengan *e-Berpadu*.

Meskipun realisasi sebesar 78,36% masih terdapat *gap* dengan target jangka menengah capaian ini tetap mencatatkan performa positif:

1. Realisasi tersebut berhasil melampaui target tahunan 2025 yang ditetapkan sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, pertumbuhan penggunaan *e-Berpadu* tetap berada pada jalur peningkatan (*on track*) dan menunjukkan konsistensi dalam upaya digitalisasi perkara pidana di tingkat banding; dan
2. Keberhasilan melewati ambang batas target tahunan memberikan fondasi yang kuat bahwa sistem digital ini mulai diadopsi secara luas oleh para pemangku kepentingan,

meskipun masih terdapat kendala teknis yang menghambat pencapaian angka ideal jangka menengah.

Performa tahun 2025 adalah keberhasilan dalam skala tahunan yang akan dijadikan batu loncatan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2026. Pengadilan Tinggi Manado optimis dapat mewujudkan digitalisasi perkara pidana sesuai dengan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat menjadi prasyarat utama bagi tegaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berwibawa dalam sistem negara hukum yang demokratis. Upaya pencapaian sasaran ini diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta penyelenggaraan layanan peradilan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Manado berupaya membangun citra lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, yang menggambarkan tingkat kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

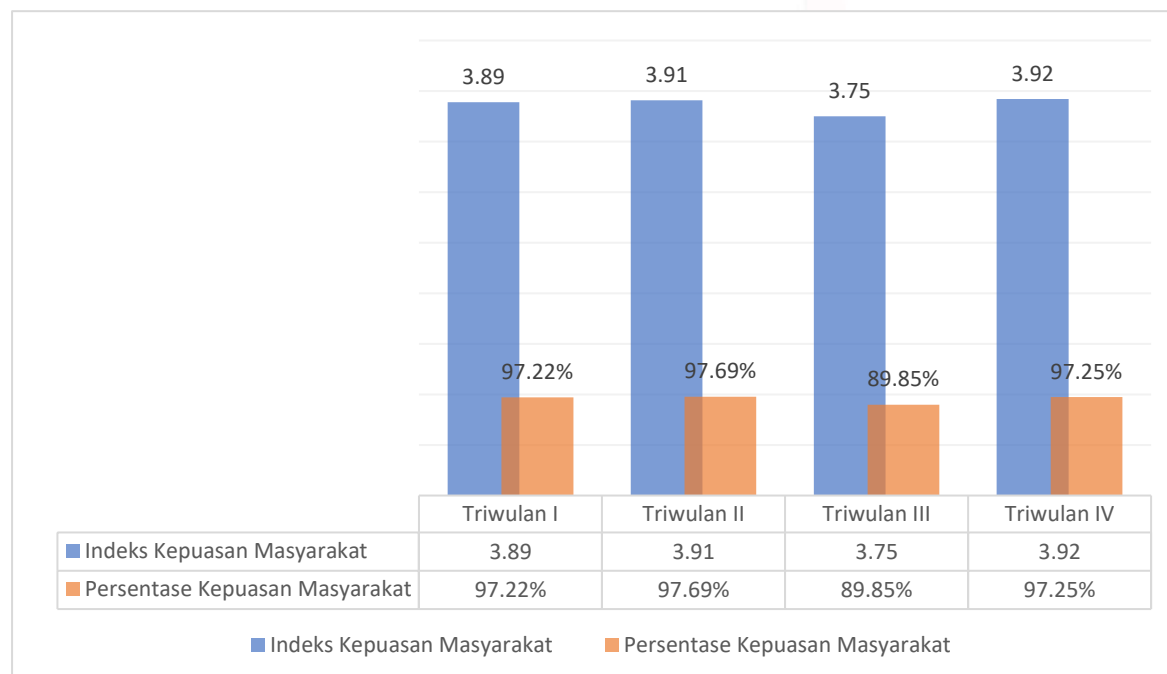
1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
9. Sarana dan prasarana.

Kriteria tersebut di atas menyesuaikan dengan unsur survei kepuasan masyarakat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

Target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 sebesar 3,6 dengan realisasi atas indikator tersebut 3,87 yang diperoleh dari total Indeks Kepuasan Masyarakat (Triwulan I, II, III dan IV) kemudian dibagi empat sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 107,43%.

Triwulan	Indeks Kepuasan Masyarakat	
I	3,89	97,22%
II	3,91	97,69%
III	3,75	89,85%
IV	3,92	97,25%
Realisasi	3,87	95,50%

Tabel III.18. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025



Grafik III.6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,32	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel III.19. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten menunjukkan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang memadai. Berdasarkan evaluasi, indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” berhasil menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik. Pencapaian ini didasarkan pada pemenuhan sembilan kriteria atau unsur sesuai dengan standar pelayanan publik. Capaian ini juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah berhasil mengintegrasikan standar layanan yang ditetapkan ke dalam praktik sehari – hari.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Manado menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya karena memiliki substansi dan karakteristik yang selaras indikator kinerja sebelumnya “Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan”.

Tahun	Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	94,02%	-	90%	94,02	104,46
2023	93,79%	-	90%	93,79	104,21
2024	94,89%	-	90%	94,89	105,43
2025	-	3,87	3,6	3,87	107,43

Tabel III.20. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

1. Periode 2022–2024, menggunakan skala persentase, realisasi kinerja cukup stabil dengan capaian kinerja selalu berada di atas 104%. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi pelayanan yang sudah sangat baik;
2. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan indeks untuk mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Pengadilan Tinggi Manado berhasil meraih realisasi sebesar 3,87 dari target 3,6 dengan capaian sebesar 107,43%; dan
3. Capaian kinerja dari tahun ke tahun ini menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi	Target Jangka Menengah
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,87	3,68

Tabel III.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dengan realisasi sebesar 3,87 terhadap target jangka menengah 3,68, Pengadilan Tinggi Manado telah memposisikan diri sebagai unit pelayanan publik yang prima. Pencapaian ini menjadi fondasi yang kokoh untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada periode berikutnya, demi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung oleh :

a. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dengan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTSP serta penunjukan Tim Pelaksana PTSP yang kompeten sebagai motor penggerak layanan, yang terus diasah dan ditingkatkan kapabilitasnya melalui pelatihan.

b. Sistem *Monitoring* Terpadu

Pembentukan Tim Penyusun Survei IKM, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta mekanisme survei harian untuk memantau *feedback* yang diberikan pengguna layanan secara *real-time*. Selain itu, tim mengumpulkan dan mengolah data survei secara objektif, transparan, dan terukur sebagai bahan evaluasi internal serta mengidentifikasi 3 (tiga) unsur layanan terendah.

c. Budaya Kerja dan Motivasi

Pelaksanaan *briefing* rutin dan pengawasan berkala, serta pemberian apresiasi melalui *reward* Petugas PTSP Terbaik secara periodik untuk memicu semangat.

d. Aksesibilitas Instrumen

Adanya instrumen survei yang mudah dipahami, dan dapat diakses dengan cepat oleh pengguna layanan.

e. Pengambilan Keputusan Strategis

Melaporkan seluruh hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado sebagai landasan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis demi peningkatan layanan yang berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini menggambarkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Melalui peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan anggaran dan aset yang berorientasi pada hasil, Pengadilan Tinggi Manado berupaya menciptakan sistem manajemen yang modern dan berdaya saing.

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

1. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran.
2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran.
3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan Pengukuran.

4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. 91 – 100 (sangat tinggi);
- b. 81 – 90 (tinggi);
- c. 71 – 80 (sedang);
- d. 61 – 70 (rendah); dan
- e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Melalui sinkronisasi data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung dan SIASN Badan Kepegawaian Negara, Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pengadilan Tinggi Manado sebesar 77,33 (kategori sedang).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	77,33	71	77,33	108,92

Tabel III.22. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi	Target Jangka Menengah
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77,33	73

Tabel III.23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dalam usaha untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional, Pengadilan Tinggi Manado berhasil mengelola sumber daya manusia sehingga indeks profesionalitas (IP) ASN berhasil mencapai angka 77,33. Pencapaian ini sangat signifikan karena berhasil melampaui target jangka menengah sebesar 73.

Keberhasilan ini merupakan buah dari strategi integratif yang menyentuh empat dimensi utama profesionalitas:

1. Optimalisasi Kualifikasi dan Kompetensi

Pencapaian ini didorong oleh pemenuhan standar pendidikan dan pengembangan kompetensi, dengan mendorong seluruh ASN untuk meningkatkan Pendidikan dan mengikuti pelatihan baik secara kolektif maupun *self-pace*.

2. Efektivitas Manajemen Kinerja

Implementasi sasaran kinerja pegawai yang terukur telah membentuk budaya kerja yang produktif, terutama dengan adanya prosedur pengukuran kinerja yang menentukan pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Penegakan Disiplin yang Konsisten

Tingginya realisasi ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan yang kuat terhadap kode etik dan regulasi disiplin ASN.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah memiliki fondasi dasar yang kuat dalam menata dan mengelola sumber daya manusia. Hal ini juga membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya untuk menjadi satuan kerja dengan *Manajemen yang Transparan dan Profesional*. Ke depannya, Pengadilan Tinggi Manado akan menggunakan data IP ASN untuk memetakan kesenjangan (*gap*) kompetensi, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan diklat atau pengembangan pendidikan bagi aparatur peradilan.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%);
- b. Penyerapan Anggaran (20%);
- c. Penyelesaian Tagihan (10%);
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);
- f. Belanja Kontraktual (10%);
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan
- h. Capaian Output (25%).

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Manado berhasil memperoleh Nilai IKPA masing – masing 100 untuk DIPA (01) dan (03). Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 95 sehingga capaiannya 105,26%.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	100	95	100	105,26

Tabel III.24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi	Target Jangka Menengah
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	100	97

Tabel III.25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Nilai IKPA sebesar 100 dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah berhasil mengerjakan 3 (tiga) aspek utama kualitas anggaran:

1. Kualitas Perencanaan: penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah disusun sangat akurat dan selaras dengan realisasi bulanan.
2. Kualitas Pelaksanaan: penilaian terhadap kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Semua tagihan diselesaikan tepat waktu, pengelolaan UP (Uang Persediaan) sangat disiplin, dan data kontrak didaftarkan tanpa keterlambatan.
3. Kualitas Hasil: penilaian terhadap kemampuan satuan kerja dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Capaian *output* fisik terpenuhi selaras dengan penyerapan anggaran.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado (DIPA 01) meraih Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Periode s.d. Semester I Tahun 2025 dan kembali meraih Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik s.d. Bulan November 2025 dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi ini mencerminkan konsistensi Pengadilan Tinggi Manado dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran secara tepat waktu, tertib administrasi dan berorientasi pada hasil.

Capaian tersebut di atas tentunya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan disiplin dalam mengelola anggaran yang tersedia serta memahami regulasi keuangan. Terakhir, adanya sinergi antara Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kolaborasi aktif yang ditunjukkan melalui Rapat Evaluasi Anggaran dan Rencana Penarikan Dana secara berkala yang diikuti oleh Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Bagian dan Para Kepala Subbagian memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan mendukung kelancaran fungsi teknis dan administrasi.

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja. NKPA berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja.

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Manado memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 untuk DIPA 01 dan 91,49 untuk DIPA 03.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	95,75	78	95,75	122,75 Normalisasi Capaian 110

Tabel III.26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi	Target Jangka Menengah
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95,75	91

Tabel III.27. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian NKPA sebesar 95,75 pada tahun 2025 menjadi langkah awal yang sangat positif dan strategis. Bagi Pengadilan Tinggi Manado, NKPA dapat menjadi alat evaluasi yang objektif untuk menilai kualitas perencanaan yang telah disusun. NKPA dapat dipantau melalui Aplikasi *Monev Kemenkeu* yang menyediakan informasi berbasis data yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan penguatan kinerja.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang menjadi indikator kinerja baru ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi Manado. Pemahaman pengisian data, keterkaitan *output* dan SBK serta konsistensi pelaporan menjadi fokus utama sehingga ke

depannya Pengadilan Tinggi Manado akan selalu berkoordinasi secara aktif dengan KPPN Manado untuk meningkatkan kualitas data dan pemahaman.

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks pengelolaan aset merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup satuan kerja. Indeks Pengelolaan Aset dikonversi ke dalam indeks 1 – 4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks 4 (Sangat Baik);
2. Indeks 3 (Baik);
3. Indeks 2 (Cukup); dan
4. Indeks 1 (Buruk).

Pada tahun 2025, Tim Penilai Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Manado sebesar 3,68. Target yang ditetapkan sebesar 3 berhasil dilampaui sehingga capaiannya 122,67%.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (*baseline*) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang.

Tahun	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	3,68	3	3,68	122,67 Normalisasi Capaian 110

Tabel III.28. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi	Target Jangka Menengah
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,68	3,60

Tabel III.29. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif. Realisasi sebesar 3,68 tersebut di atas menjadi langkah awal yang positif bagi Pengadilan Tinggi Manado dalam meningkatkan kualitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 425/DJU/OT1.6/II/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Hal Data Target dan Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado melakukan perbandingan capaian kinerja di level nasional Tahun 2025 seluruh Tingkat Banding di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	BENCHMARK KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025																																							
2																																								
3	No.	Kode Satker	Kode Wilayah	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern															Sasaran Strategis II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik					Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional															
4					Indikator Kinerja															Indikator Kinerja					Indikator Kinerja															
5					Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase perkara perduta pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan eBerpadu			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
6					Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian
7	1	090082	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	98.48%	99.58%	103.24%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98.48%	100.75%	89.93%	94.38%	104.95%	3.78	3.81	96%	71	87.48	123.21%	93	98.45	105.88%	93	90.75	97.58%	75	100	133.33%	75	87.45	116.60%	3.00	3.45	115.00%
8	2	090087	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98%	102.43%	89.93%	41.28%	45.90%	3.78	3.97	105%	71	82.45	116.13%	93	93.2	100.22%	93	86.42	92.92%	75	93.3	124.40%	75	95.82	127.49%	3.00	3.18	108.00%
9	3	090090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.28%	89.93%	79.39%	88.28%	3.78	3.94	104%	71	77.24	108.79%	93	99.71	107.22%	93	95.34	102.52%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.3	110.00%
10	4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	72.07%	80.14%	3.78	3.928	104%	71	78.5	110.56%	93	97.41	104.74%	93	91.37	98.25%	75	100	133.33%	75	89.85	119.80%	3.00	3.3	110.00%
11	5	090132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	103.92%	89.93%	78.88%	85.47%	3.78	3.93	104%	71	75.87	108.88%	93	99.28	106.75%	93	93.18	100.19%	75	90.71	120.96%	75	87.99	117.32%	3.00	3.1	103.33%
12	6	090169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	98.95%	109.81%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	79.63%	88.55%	3.78	3.9	103%	71	79.42	111.88%	93	99.48	106.97%	93	99.3	106.77%	75	100	133.33%	75	85.77	114.36%	3.00	3.25	108.33%
13	7	090189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99%	103.38%	89.93%	88.73%	88.67%	3.78	3.88	102%	71	81.85	115.28%	93	98	105.38%	93	98	105.38%	75	98	106.67%	75	83	110.67%	3.00	3.85	121.67%
14	8	090204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	98.48%	98.00%	101.60%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98%	102.34%	89.93%	71%	78.95%	3.78	3.83	101%	71	81.33	114.55%	93	94.7	101.83%	93	86.86	93.40%	75	81.25	108.33%	75	85	113.33%	3.00	3.37	112.33%
15	9	400493	0900	Pengadilan Tinggi Riau	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	51.93%	57.74%	3.78	3.96	105%	71	81.58	114.90%	93	100	107.53%	93	100	107.53%	75	85	113.33%	75	85	113.33%	3.00	3.2	106.67%
16	10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	100.00%	111.20%	3.78	4	106%	71	79	111.27%	93	100	107.53%	93	100	107.53%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.75	125.00%
17	11	090225	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	76.47%	85.03%	3.78	3.99	106%	71	84.87	119.54%	93	95.14	102.30%	93	98.25	105.66%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.175	105.83%
18	12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98%	102.34%	89.93%	80.65%	89.88%	3.78	4	106%	71	80.63	113.56%	93	97.72	105.08%	93	85.8	92.28%	75	100	133.33%	75	100	133.33%	3.00	3.1	103.33%
19	13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	77%	85.29%	3.78	3.89	103%	71	87.28	122.90%	93	99	106.45%	93	89.4	96.13%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.825	120.83%
20	14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	77.73%	88.43%	3.78	3.96	105%	71	83.98	118.28%	93	99.08	106.54%	93	96.41	103.67%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.35	111.67%
21	15	090253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	98.48%	99.81%	103.47%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99.31%	103.71%	89.93%	87.14%	96.90%	3.78	3.98	105.29%	71	81.63	114.97%	93	98.77	106.20%	93	94.99	102.14%	75	100	133.33%	75	82	109.33%	3.00	3.25	108.33%
22	16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	54.11%	60.17%	3.78	3.94	104%	71	84.24	118.85%	93	98.84	106.28%	93	90.46	97.27%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.6	120.00%
23	17	090313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	98.48%	100%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99.52%	103.93%	89.93%	78.36%	87.13%	3.78	3.87	102%	71	77.33	108.92%	93	100	107.53%	93	100	107.53%	75	100	133.33%	75	91.49	121.96%	3.00	3.68	122.67%
24	18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98.43%	102.79%	89.93%	79.10%	87.96%	3.78	3.90	103%	71	88.93	122.44%	93	98.83	106.05%	93	94.01	101.09%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.325	110.83%
25	19	090419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	98.48%	99.91%	103.58%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98.78%	104.20%	89.93%	75.82%	84.31%	3.78	3.84	96%	71	78.69	110.83%	93	100	107.53%	93	85.83	92.29%	75	83.73	111.64%	75	73.2	97.60%	3.00	2.95	98.33%
26	20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	98.48%	99.00%	102.63%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99%	103.38%	89.93%	79.00%	87.85%	3.78	3.9	103%	71	79.53	112.01%	93	97.86	105.01%	93	84.37	90.72%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	4	133.33%
27	21	090862	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99%	103.05%	89.93%	68.00%	73.36%	3.78	3.97	105%	71	82.2	115.77%	93	93	100.00%	93	93	100.00%	75	96.28	128.35%	75	96.28	128.35%	3.00	3.2	106.67%
28	22	090774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	98.48%	99.55%	103.20%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	83.44%	92.78%	3.78	3.91	103%	71	82.17	115.73%	93	99.97	107.49%	93	99.15	106.61%	75	100	133.33%	75	83.5	111.33%	3.00	3.525	117.50%
29	23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	99.56%	104.00%	89.93%	74.33%	82.85%	3.78	3.87	102%	71	85.05	119.79%	93	98.89	106.33%	93	93.33	100.35%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.33	111.00%
30	24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	98.48%	99.78%	103.42%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98%	102.18%	89.93%	52.32%	58.18%	3.78	3.97	105%	71	79.92	112.56%	93	100	107.53%	93	100	107.53%	75	100	133.33%	75	86.82	115.49%	3.00	3.125	104.17%
31	25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	57.25%	63.86%	3.78	3.85	102%	71	76.44	107.66%	93	97.99	106.37%	93	87.97	94.59%	75	100	133.33%	75	77.7	103.60%	3.00	3.2	106.67%
32	26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98%	102.34%	89.93%	77.47%	86.14%	3.78	3.99	106%	71	77.1	106.56%	93	98.18	105.57%	93	94.24	101.33%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.4	113.33%
33	27	664523	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	100%	104.43%	89.93%	100	111.20%	3.78	3.8	101%	71	84.72	119.32%	93	98.86	106.08%	93	91.17	98.03%	75	100	133.33%	75	85	113.33%	3.00	3.2	106.67%
34	28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	98.48%	100.00%	103.67%	100%	100%	100%	90.11%	100%	110.98%	95.78%	98.39%	102.75%	89.93%	19.67%	21.87%	3.78	3.88	103%	71	82.3	115.92%	93	98.84	106.08%	93	99.88	107.18%	75	100	133.33%	75	93.81	125.08%	3.00	3.5	

Pada Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”, Pengadilan Tinggi Manado berhasil menyelesaikan seluruh perkara secara tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 103,67%, melampaui target nasional. Seluruh pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju juga dilaksanakan tepat waktu, selaras dengan target nasional. Capaian atas persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan sebesar 110,98%, jauh di atas target nasional, yang mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi peradilan.

Dalam hal pemanfaatan layanan berbasis elektronik (seperti *e-Court* dan *e-Berpadu*), Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan adaptasi teknologi yang baik dalam peradilan khususnya penggunaan *e-Court* dalam pengajuan perkara perdata pada tingkat banding, yang melampaui target nasional. Sebaliknya, penggunaan *e-Berpadu* masih memerlukan ruang pertumbuhan meskipun capaian sebesar 87,13% dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata – rata nasional (80,73%).

Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Manado berada di atas standar nasional 3,78, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan peradilan dinilai positif oleh para pengguna layanan.

Pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Manado sebesar 77,33 melampaui target nasional. Akan tetapi masih ada ruang untuk peningkatan kompetensi dan/atau kualifikasi pegawai. Nilai IKPA sebesar 100, berada di atas target nasional 93 dan lebih tinggi dari rata rata nasional, yang mencerminkan tata kelola anggaran yang efektif dan akuntabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta Indeks Pengelolaan Aset juga menunjukkan capaian di atas standar nasional, menandakan perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset telah dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi. Bahkan secara keseluruhan, Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Manado berada pada peringkat 2 dari 34 Pengadilan Tinggi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses organisasi. Efisiensi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya secara minimum dan tepat guna untuk mencapai hasil pelayanan hukum yang optimal. Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten telah mengelola sumber daya yang ada dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas.

A. Sumber Daya Manusia

Sampai pada akhir tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado mempunyai sumber daya manusia sebanyak 66 aparatur peradilan. Pengadilan Tinggi Manado memiliki rasio yang cukup ideal antara Hakim Tinggi dan Apartur Peradilan lainnya. Pada tahun 2025, terjadi mutasi keluar 1 (satu) Hakim Tinggi, 2 (dua) Hakim Tinggi pensiun (meninggal dunia) sedangkan mutasi masuk sebanyak 1 (satu) Hakim Tinggi. Sedangkan panitera muda/panitera pengganti yang memasuki masa pensiun pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) dan mutasi masuk sebanyak 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panitera Muda dan 1 (satu) Panitera Pengganti.

Realisasi penyelesaian perkara tetap dapat dilaksanakan secara tepat waktu menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM Hakim Tinggi dan Fungsional Kepaniteraan dilakukan secara efisien melalui pengaturan penugasan yang terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik, secara konsistensi menjalankan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur terkait penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Manado. Proses teknis seperti pengiriman salinan putusan serta pemanfaatan layanan elektronik *e-Court* dan *e-Berpadu* dilaksanakan secara optimal oleh SDM pada unit Kepaniteraan.

Dalam hal memastikan kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Manado berjalan dengan baik didukung oleh Unit Kesekretariatan (*Supporting Unit*). Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, untuk memastikan Nilai IKPA dan NKPA mencapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan, terdapat KPA (Sekretaris), PPK (Fungsional APK-APBN), Bendahara (Pranata Keuangan APBN), PPSPM (Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan), serta Pengelola Keuangan lainnya. Subbagian Rencana Program dan Anggaran memastikan penyusunan RPD pada Aplikasi SAKTI, perencanaan kinerja dan anggaran. Sedangkan pengelolaan aset dilaksanakan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam bertanggung jawab memastikan setiap data pada Aplikasi SIKEP selalu diperbarui, pembaruan data tersebut mencakup riwayat jabatan, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, serta penilaian kinerja SDM. Pengelolaan data kepegawaian yang tertib tersebut mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Selain itu, peranan Pranata Komputer dalam tata kelola teknologi informasi, manajemen layanan TI, pengelolaan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta dukungan multimedia

berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional Pengadilan Tinggi Manado. Fungsi ini memastikan ketersediaan jaringan, keamanan data perkara, integrasi aplikasi peradilan, serta dukungan teknis bagi hakim dan aparatur. Secara keseluruhan, efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Manado ditunjukkan oleh kemampuan organisasi menjaga capaian kinerja utama dengan jumlah aparatur yang tersedia. Penetapan uraian tugas masing – masing, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antarunit yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap aparatur memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

B. Sumber Daya Anggaran

Selain aspek sumber daya manusia, efisiensi penggunaan sumber daya anggaran penting dalam menjaga keberlangsungan operasional.

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian (%)
1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17	104,17
1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	100%	102,04	102,04
1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,09	103,09
1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	99,52%	102,60	102,60
1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	78,36%	101,77	101,77
Rata-rata capaian Indikator Kinerja 1.1 – 1.5			102,73	102,73
Capaian kinerja keuangan DIPA (03)	167.522.000	165.240.507	98,64	
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik				
2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,87	107,43	107,43
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	77,33	108,92	108,92
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	105,26	105,26
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	95,75	122,75	110
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,67	110
Rata-rata capaian Indikator Kinerja 2.1, 3.1 – 3.4			113,40	108,32
Capaian kinerja keuangan DIPA (01)	21.616.040.000	21.483.362.839	99,39	

Kriteria : Capaian kinerja < capaian realisasi anggaran

Tabel III.30. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 tersebut di atas, efisiensi sumber daya anggaran tercermin dari perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis kinerja Pengadilan Tinggi Manado. Pada DIPA (03) pagu anggaran sebesar 167.522.000 direalisasikan sebesar 165.240.507 atau 98,64%. Seluruh indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 mencapai nilai rata rata 102,73%. Sedangkan DIPA (01) dengan pagu anggaran sebesar 21.616.040.000 dan realisasi sebesar 21.483.362.839 atau 99,39%. Rata rata capaian indikator pada Sasaran Strategis 2 dan 3 mencapai 113,40% dengan normalisasi capaian 108,32%. Data ini menunjukkan bahwa *output* kinerja dapat dicapai melebihi target meskipun terdapat sisa anggaran, sehingga penggunaan anggaran bersifat efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado sangat ditunjang oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA (03) dan dan Program Dukungan Manajemen DIPA (01).

DIPA (01)

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 17.183.175.000,-. Akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan tenaga PPNPN menjadi PPPK, Pengadilan Tinggi Manado memperoleh tambahan anggaran belanja pegawai. Adapula efisiensi anggaran serta pembukaan blokir sekaligus penarikan anggaran pada akun belanja perjalanan dinas. Pada akhir tahun 2025, pagu anggaran DIPA (01) Pengadilan Tinggi Manado sebesar 21.616.040.000,-.

No.	Pagu Anggaran (Semula)	(+/-)	Pagu Anggaran (Menjadi)	Keterangan
1	17.183.175.000	1.684.440.000	18.867.615.000	Penambahan belanja pegawai
2	18.867.615.000	554.271.000	19.421.886.000	Penambahan belanja pegawai
3	19.421.886.000	3.902.964.000	23.324.850.000	Penambahan belanja pegawai dan belanja barang operasional
4	23.324.850.000	(1.059.283.000)	22.265.567.000	Penambahan belanja pegawai dan penarikan belanja barang operasional
5	22.265.567.000	(201.813.000)	22.063.754.000	Pembukaan blokir sekaligus penarikan belanja perjalanan dinas (524) oleh Eselon 1
6	22.063.754.000	(447.714.000)	21.616.040.000	Penambahan belanja pegawai dan penarikan belanja barang operasional
Pagu Anggaran (Akhir)			21.616.040.000	

Tabel III.31. Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

Rincian Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Manado :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

b. Belanja Barang

Belanja barang terdiri dari:

- Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

- Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang non operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.119.707.000	18.000.702.292	99,34	119.004.708
2	Belanja Barang Operasional	3.118.881.000	3.105.728.547	99,58	13.152.453
		300.000	300.000	100	0
3	Belanja Barang Non Operasional	700.000	700.000	100	0
4	Belanja Modal	376.452.000	375.932.000	99,86	520.000
TOTAL		21.616.040.000	21.483.362.839	99,39	132.677.161

Tabel III.32. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (01) Tahun Anggaran 2025

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	22.552.853.000	21.930.802.000	97,24
2	2023	19.523.022.000	19.324.650.115	98,98
3	2024	17.597.069.000	17.361.833.163	98,66
4	2025	21.616.040.000	21.483.362.839	99,39

Tabel III.33. Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, tingkat penyerapan anggaran DIPA (01) dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif di mana realisasi selalu di atas 97% bahkan di tahun 2025, realisasi mencapai 99,39%. Meskipun terjadi perubahan pagu anggaran setiap tahunnya, Pengadilan Tinggi Manado telah menunjukkan komitmen dalam memastikan program kerja terlaksana sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan.

Grafik III.7. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

DIPA (03)

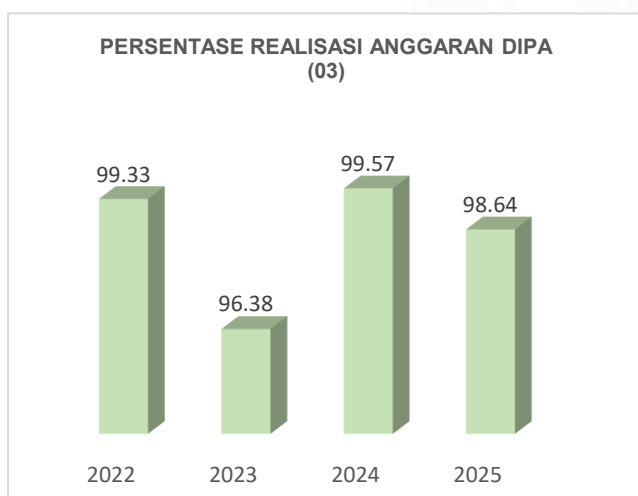
Pada awal tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Rp 236.797.000,- dan sehubungan dengan adanya pembukaan blokir sekaligus penarikan belanja perjalanan dinas oleh Eselon 1 maka pada akhir tahun 2025, Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Manado menjadi Rp 167.522.000,-. Rincian Pagu Anggaran DIPA (03) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Manado :

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Barang Operasional	167.522.000	165.240.507	98,64	2.281.493

Tabel III.34. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (03) Tahun Anggaran 2025

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	296.556.000	294.593.258	99,33
2	2023	203.375.000	196.004.413	96,38
3	2024	188.206.000	187.401.760	99,57
4	2025	167.522.000	165.240.507	98,64

Tabel III.35. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi anggaran DIPA (03) selama empat tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik, di atas 96%. Tren penurunan alokasi pagu anggaran dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya skala prioritas dan/atau efisiensi belanja setiap tahunnya.

Grafik III.8. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Meskipun realisasi pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, hal ini bukan berarti penurunan kinerja penyerapan melainkan implikasi logis dari penurunan pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025. Pemanfaatan anggaran pada tahun 2025 tetap maksimal karena sisa anggaran yang tidak terpakai hanya sebesar 1,36%.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 dapat dilihat dari keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama serta realisasi kinerja yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum menjadi faktor utama keberhasilan Sasaran Strategis *“Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern”*.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama berkontribusi dalam mewujudkan Sasaran Strategis *“Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik”* dan *“Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional”*.

Secara spesifik, berikut beberapa hal yang menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam mencapai kinerja tahun 2025:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama pada lingkungan peradilan untuk mewujudkan *good governance*. Tidak hanya pada penanganan perkara yang memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penerapan sistem peradilan elektronik seperti *e-Court* dan *e-Berpadu*, tata kelola internal Pengadilan Tinggi Manado oleh Kesekretariatan juga menggunakan teknologi informasi seperti SIKEP, SAKTI, Monev Keuangan, E-Sadewa, SIMAN, *MyIntress* dan lain – lain.

2. Penguatan Manajemen Perkara

Pelaksanaan rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara perdata, rapat teknis pimpinan dengan Hakim Tinggi, serta monitoring dan evaluasi rutin terhadap SIPP dan EIS, menunjang keberhasilan dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Manado.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Pelatihan petugas PTSP yang bekerja sama dengan pihak eksternal (seperti BRI) menjadi langkah yang tepat karena sektor perbankan memiliki standar layanan yang tinggi pada sektor jasa sehingga pelatihan ini menambah pengetahuan petugas PTSP dalam memberikan layanan kepada para pengguna layanan yang hadir pada Pengadilan Tinggi Manado. Sedangkan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP memastikan

petugas PTSP berada di meja pelayanan sebelum jam layanan dimulai dan tidak meninggalkan tempat selama jam kerja tanpa petugas pengganti.

4. Manajemen Anggaran dan Aset

a. Asistensi Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Koordinasi rutin dengan KPPN untuk memastikan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran tetap minimal. Hal ini mencegah terjadinya penumpukan pencairan dana di akhir tahun.

b. Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

c. *Update* Regulasi Terkini

Mengikuti sosialisasi baik dari KPPN maupun Kanwil DJPb terkait perubahan aturan teknis perbendaharaan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang menghambat operasional kantor.

5. Publikasi Layanan dan Informasi secara berkala lewat *website* dan media sosial.

Potensi Hambatan dan Kendala

Meskipun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 secara umum telah melebihi target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala dan kebutuhan anggaran yang diidentifikasi untuk pengembangan ke depan:

1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Manado masih memerlukan tambahan anggaran khususnya untuk pembangunan ruang arsip serta pengadaan perangkat alat pengolah data dan komunikasi dan fasilitas perkantoran.

2. Keterbatasan Anggaran Kegiatan

Diperlukan dukungan anggaran lebih lanjut untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis baik bagi unit Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

3. Adaptasi Indikator Baru

Adanya indikator kinerja baru (seperti Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) menjadi tantangan tersendiri dalam hal pemahaman pengisian data, keterkaitan *output*, dan konsistensi pelaporan.

4. Kesenjangan Kompetensi

Pengadilan Tinggi Manado masih perlu memetakan kesenjangan (*gap*) kompetensi aparatur yang harus ditindaklanjuti melalui program pendidikan dan pelatihan.

Pada Bab III ini juga memuat Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado, sesuai arahan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Tindak lanjut disusun dengan memperhatikan rekomendasi yang tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3682/BP/PW1.1.1/IX/2025 Tanggal 08 September 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Manado.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan Eviden
A. PERENCANAAN KINERJA								
1.	Agar memastikan RKT disusun dan ditetapkan di awal tahun sebelumnya atau sebelum penyusunan RKA. Dan dokumen PK diajukan segera setelah DIPA tahun berjalan diterima.	Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2024 atau setelah perjanjian kinerja ditetapkan tanggal 10 Januari 2024. (1.a.4)	Menyusun serta memastikan kembali RKT Periode Berikutnya disusun sebelum PKT disusun.	100%	November 2025 Januari 2026	Panitera / Sekretaris	Selesai	https://bit.ly/tl_akip_2024
2.	Agar memastikan setiap dokumen perencanaan disusun dan dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku tentang penyampaian dokumen SAKIP	Karena RKT tahun 2024 seharusnya sudah ditetapkan pada awal tahun 2023, maka seharusnya sudah dipublikasikan di tahun 2023 sedang RKT baru disusun dan ditetapkan pada tahun 2024 yang menyebabkan dokumen	Melaksanakan penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%	Februari 2026	Panitera / Sekretaris	Selesai	https://bit.ly/tl_akip_2024

		RKT tidak dipublikasikan tepat waktu berdasarkan surat SEKMA No. 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang penyampaian dokumen SAKIP. (1.b.2)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. PELAPORAN KINERJA

1.	Agar dokumen LKjIP yang disusun memperhatikan sistematika penyusunan yang sesuai dengan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014.	LKjIP sudah disusun namun belum sesuai standar. Dokumen LKjIP yang disampaikan pada BAB III belum sesuai sistematika yang tertuang dalam Permenpan 53 tahun 2014. Untuk setiap pernyataan kinerja (indikator) sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja	Melaksanakan penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2025 yang sesuai dengan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	100%	Januari – Februari 2026	Panitera / Sekretaris	Selesai	https://bit.ly/tl_akiP_2024
2.	Agar tim pereviu LKjIP lebih teliti dalam melaksanakan reviu dan memastikan bahwa laporan kinerja telah sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014.	Laporan kinerja telah direviu sesuai dengan laporan pernyataan telah direviu tertanggal 26 Februari 2025. Tim reviu LKjIP agar lebih teliti dalam melaksanakan reviu. Masih ditemukan kesalahan pencantuman target pada perbandingan realisasi dengan	Melaksanakan reviu dokumen LKjIP Tahun 2025 yang sesuai dengan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	100%	Januari – Februari 2026	Panitera / Sekretaris	Selesai	https://bit.ly/tl_akiP_2024

		target jangka menengah pada LKjIP PT Manado tahun 2024 (hal 32). (3.a.4)						
3.	Agar pengisian data dan informasi Laporan Kinerja memperhatikan sumber data seperti Reviu Renstra, Reviu IKU, Reviu PKT, Reviu RKT, dsb.	Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah namun terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam bab III LKJIP PT Manado, tidak sesuai dengan target yang tertera pada Renstra PT Manado 2020-2024. Contoh: target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada renstra sebesar 95% namun pada data di bab 3, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, target tersebut 90%. (3.b.4).	Melaksanakan penyusunan dan reviu dokumen LKjIP Tahun 2025 yang sesuai dengan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	100%	Januari – Februari 2026	Panitera / Sekretaris	Selesai	https://bit.ly/tl_akiP_2024

Tabel III.36. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado

Dengan selesainya seluruh tindak lanjut ini, Pengadilan Tinggi Manado diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan AKIP secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang konsisten dan terukur pada seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh indikator kinerja utama pada tiga sasaran strategis berhasil melampaui target, baik pada aspek teknis yudisial, pelayanan publik, maupun tata kelola manajemen peradilan.

Pada sasaran “terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern”, Realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu, pengiriman salinan putusan pada Pengadilan Pengaju dan pengunggahan putusan pada direktori putusan mencapai 100 persen dengan total 383 perkara yang diselesaikan secara tepat waktu. Kinerja terkait pemanfaatan sistem *e-Court* dan *e-Berpadu* juga menunjukkan capaian di atas target. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem manajemen perkara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan berjenjang yang berjalan secara konsisten.

Pada sasaran “meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik”, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan mencapai nilai 3,87 dari target 3,6 atau setara dengan capaian 107,43 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan, perilaku aparatur, mekanisme pengaduan, serta sarana dan prasarana telah memenuhi harapan pengguna layanan secara nyata.

Pada sasaran “terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional”, seluruh indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Profesionalitas ASN sebesar 77,33, Nilai IKPA sebesar 100, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 95,75, dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset mencapai 3,68. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan aset telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif.

Setelah dilakukan normalisasi sesuai ketentuan yang berlaku, Nilai Kinerja Organisasi tercatat sebesar 94,97 persen dengan predikat Baik. Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 mencerminkan kesiapan Pengadilan Tinggi Manado dalam memasuki periode awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, serta menunjukkan fondasi yang kuat dalam mendukung transformasi peradilan, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal pencapaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 99,39%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar 98,64%.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan capaian kinerja yang tertuang secara transparan dan akuntabel dapat menjadi acuan atau patokan dalam pencapaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Untuk melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Manado maka :

1. Pengadilan Tinggi Manado perlu mempertahankan konsistensi pengelolaan perkara secara tepat waktu dengan memperkuat Susunan Majelis Hakim, Manajemen Beban Kerja Hakim Tinggi serta monitoring berbasis data melalui SIPP dan EIS agar realisasi 100 persen dapat dijaga secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Optimalisasi pemanfaatan sistem peradilan elektronik perlu terus ditingkatkan, khususnya pada penggunaan *e-Berpadu*.
3. Pengembangan kompetensi aparatur peradilan perlu dilanjutkan melalui perencanaan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan hasil evaluasi IP ASN, termasuk peningkatan kualitas pelatihan, penilaian kinerja individu, dan penguatan disiplin kerja.
4. Pengelolaan anggaran dan aset yang telah menunjukkan kinerja sangat baik perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan Tinggi Manado perlu menjaga kesinambungan komitmen integritas melalui penguatan pengendalian internal, transparansi informasi publik, serta internalisasi nilai anti korupsi dalam seluruh proses kerja.
6. Setelah memperoleh predikat Unggul pada Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado perlu mengarahkan Program AMPUH ini sebagai pengendalian mutu yang berkelanjutan bukan sekadar pemenuhan persyaratan asesmen, di mana pengelolaan dokumen AMPUH perlu ditingkatkan dari aspek kualitas bukan hanya kelengkapan.



LAMPIRAN

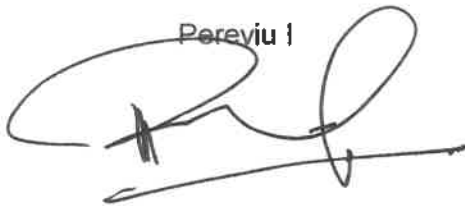


FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Pernyataan	Check List
1. Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2. Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
	4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
	7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3. Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓

	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Pereviu I



Heru Purwanto, S.Kom.



Manado, 27 Februari 2026

Pereviu II



Ronald Yau, S.T.

Pereviu III



Retzi Yosia Lewu, S.T.,M.Kom.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MANADO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASLI GINTING, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Manado**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum**


H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

**Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado**


ASLI GINTING, S.H.,M.H.
NIP. 19580404 198403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Tipikor	97%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%
		c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Tipikor	97%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 376.452.000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 16.806.723.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 236.797.000,-

Manado, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado


ASLI GINTING, S.H.,M.H.
NIP. 19580404 198403 1 002

REVIU KE -I
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MANADO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Manado, 16 Januari 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado


AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.
NIP. 19600801 198612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		c. Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		e. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 376.452.000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 16.806.723.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 236.797.000,-

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Manado, 16 Januari 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado


AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.
NIP. 19600801 198612 1 001



**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Manado;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 940/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi capaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA ...

- KETIGA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 11 November 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 942/KPT.W19-U/OTI.6/XI/2025
TANGGAL : 11 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan moderu	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pertama secara tepat waktu x 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/ pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan x 100% Jumlah putusan yang telah dimintasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court x 100% Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Penitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu x 100% Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan Catatan : 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Penitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Pendaftaran Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Pendaftaran Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.		
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari kredial terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perlaku pelaksana; 8. Peningkatan pengadilan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: 1. Pelayanan administrasi perdagangan; 2. Pelayanan pengadilan; 3. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Sekretaris	Laporan Tahunan
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengeluaran UP dan TUP (10%); dan h. Capaian Output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Dijen Pertendelheraan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan Triwulan, Semester dan Tahunan

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%); - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); dan - Agregasi Capaian RO Sektur (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi sektor Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan Triwulanan Semester dan Tahunan
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengedilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-sedewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran


KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMIN SUTIKNO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025

TANGGAL : 11 November 2025

KAMUS IKU

PENGADILAN TINGGI MANADO

Sasaran Strategis : 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Nama IKU	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang diselesaikan tepat waktu memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i> ; 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i> ; dan 5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Nama IKU	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu B= Jumlah perkara yang diputus
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>; 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>; dan 5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Nama IKU	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Definisi	Mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan B= Jumlah putusan yang telah diminutasi
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>; dan 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>.

Nama IKU	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui <i>e-Court</i> dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i> B= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; dan 4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
--	---

Nama IKU	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>
Definisi	Mengukur jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui <i>e-Berpadu</i> dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A= Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Berpadu</i> B= Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; dan 4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Sasaran Strategis : 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Nama IKU	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;

	3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT
Satuan yang Digunakan	Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Laporan Triwulan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Triwulan
Metode Pengambilan Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang Disusun oleh Tim Survei
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Mutu Pelayanan : 1. A (Sangat Baik); 88,31 – 100; 3,5324 – 4 2. B (Baik); 76,61 – 88,30; 3,0644 – 3,532 3. C (Kurang Baik); 65 – 76,60; 2,60 – 3,064 4. D (Tidak Baik); 25 – 64,99; 1 – 2,5996 Capaian kinerja >100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court; dan 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu. 5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 8. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran Strategis :**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Nama IKU	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
Definisi	Satu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Formula Perhitungan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator (<i>Lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>).
Satuan yang Digunakan	Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai tahun N diambil paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang diambil dari Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; dan 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Capaian kinerja >100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;

	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>; 5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>; 6. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan; 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 9. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
--	--

Nama IKU	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan h. Capaian Output (25%). Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semester Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai IKPA bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai IKPA yang diambil dari Laporan Subbag Keuangan dan Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Nilai IKPA dikategorikan menjadi: a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan d. kurang, apabila nilai IKPA < 70. Capaian kinerja $>100\%$ melebihi target bulanan

	Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 5. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Nama IKU	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang berfungsi untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan; dan b. Efisiensi 25% yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran Khusus.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semester Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang diambil dari Laporan Subbag Keuangan dan Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; dan 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Nama IKU	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas tata kelola barang milik negara
Formula Perhitungan	Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tahun N diperoleh paling lambat tanggal 20 pada bulan Januari tahun N + 1
Metode Pengambilan Data	Publikasi Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) oleh Biro Perlengkapan BUA MARI
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; dan 3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMIN SUTIKNO



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%
		1.3.	Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	97%
		1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	77%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



Manado, 12 November 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Manado

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

**REVIU KE-II
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MANADO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Manado**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 12 November 2025

**Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum**

**H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002**

**Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado**

**AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.
NIP. 19600801 198612 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%
		1.3.	Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%
		1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 376.452.000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.239.588.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 167.522.000,-

Manado, 12 November 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Manado



AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.
NIP. 19600801 198612 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 425/DJU/OT1.6/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Data Target dan Capaian Kinerja
Pengadilan Tingkat Banding Tahun
2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sebagai bahan analisis perbandingan informasi target kinerja satuan kerja dengan realisasi kinerja (*benchmark*) di level nasional Tahun 2025 seluruh Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka berikut kami lampirkan data target dan capaian kinerja nasional pada Pengadilan Tingkat Banding diseluruh di Indonesia tahun 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

[illegible]



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 1045/KPT.W19-U/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO

Kesatu ...



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 22 Desember 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
Ditandatangani secara elektronik
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor : 1045/KPT.W19-U/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 22 Desember 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025 PENGADILAN TINGGI MANADO**

Penanggung Jawab	: Amin Sutikno, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Manado)
Koordinator Validasi Data	: R.A. Didi Ismiatun, S.H.,M.Hum. (Hakim Tinggi)
Ketua	: Dahlan, S.E.,S.H. (Panitera)
Sekretaris	: Nikson Ladjoma, S.Sos.,S.H. (Sekretaris)
Anggota	: 1. Iriany Sipayung, S.H. (Panitera Muda Hukum) 2. Marthen Mendila, S.H. (Panitera Muda Pidana) 3. Arwin, S.H. (Panitera Muda Perdata) 4. Elsje Diane Rambe, S.H. (Panitera Muda Tipikor) 5. Serly Yu, S.Kom. (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran) 6. Charles Arthur Sinaij, S.E. (Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi) 7. Muhammad Fadly Syam, S.Kom. (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga) 8. Indika Satriyana Agusta, S.Kom.,S.H. (Kasubbag Keuangan dan Pelaporan) 9. Asri Maulina Siahaan, S.Sos. (Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan)
Tim Pereviu Laporan Kinerja	: 1. Heru Purwanto, S.Kom. (Kabag Umum dan Keuangan) 2. Ronald Yau, S.T. (Kabag Perencanaan dan Kepegawaian) 3. Retzi Yosia Lewu, S.T.,M.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)



Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
Ditandatangani secara elektronik
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor : 1045/KPT.W19-U/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 22 Desember 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
Ditandatangani secara elektronik
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



MATRIKS PKO
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI			CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN PK (1)	KOREKSI NORMALISASI BERDASARKAN AKIP (2)	CAPAIAN PK	NILAI AKHIR CAPAIAN PK (3)
1.1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	88%	Pidana	180	100%	104.17%	104.17%	10%	83.75%	
Perdala				188							
Tpkor				25							
Pidana				180							
Perdala		198	383								
Tpkor		25									
Pidana		160									
Perdala		196									
3.3		Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Persentase penghormatan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	88%	Pidana	180	100%	102.04%	102.04%	10%	91.84%
Perdala					196						
Tpkor	25										
Pidana	180										
Perdala	198		383								
Tpkor	25										
Pidana	180										
Perdala	196										
1.2	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern		Persentase putusan pengadilan yang diunggati pada direktori putusan	97%	Pidana	180	100%	103.09%	103.09%	10%	92.79%
Perdala					188						
Tpkor		25									
Pidana		180									
Perdala		198	383								
Tpkor		25									
Pidana		180									
Perdala		196									
1.3		Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdala pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	97%	Pidana	206	89.52%	102.60%	102.60%	10%	92.34%
Perdala					209						
Tpkor	120										
Pidana	14										
Perdala	134		78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor	154										
Pidana	17										
Tpkor	171										
1.4	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern		Persentase perkara perdala pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	97%	Pidana	206	89.52%	102.60%	102.60%	10%	92.34%
Perdala					209						
Tpkor		120									
Pidana		14									
Perdala		134	78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor		154									
Pidana		17									
Tpkor		171									
1.5		Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdala pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	77%	Pidana	120	78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%
Perdala					134						
Tpkor	154										
Pidana	17										
Perdala	171		78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor	154										
Pidana	17										
Tpkor	171										
2.1	Memangkainya Tingkat Kesehatan Dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	Tw 1	3.69	3.87	107.43%	107.43%	10%	96.89%
Tw 2					3.81						
Tw 3		3.75									
Tw 4		3.92									
Perdala		134	78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor		154									
Pidana		17									
Tpkor		171									
3.1		Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	Pidana	206	89.52%	102.60%	102.60%	10%	92.34%
Perdala					209						
Tpkor	120										
Pidana	14										
Perdala	134		78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor	154										
Pidana	17										
Tpkor	171										
3.2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	Tw 1	3.69	3.87	107.43%	107.43%	10%	96.89%
Tw 2					3.81						
Tw 3		3.75									
Tw 4		3.92									
Perdala		134	78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor		154									
Pidana		17									
Tpkor		171									
3.3		Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	Pidana	206	89.52%	102.60%	102.60%	10%	92.34%
Perdala					209						
Tpkor	120										
Pidana	14										
Perdala	134		78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor	154										
Pidana	17										
Tpkor	171										
3.4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	Tw 1	3.69	3.87	107.43%	107.43%	10%	96.89%
Tw 2					3.81						
Tw 3		3.75									
Tw 4		3.92									
Perdala		134	78.96%	101.77%	101.77%	10%	91.59%				
Tpkor		154									
Pidana		17									
Tpkor		171									

Total Capaian PK

NKO atau Rata-Rata Capaian PK

Predikat PKO

94.80%

94.80%

94.80%

Total Capaian PK
 NKO atau Rata-Rata Capaian PK
 Predikat PKO

948.75%
 94.88%
 BAIK

Dashboard

- Home
- Statistik TK Banding
- Salus Perkara
- Penalaran
- Biaya Perkara
- Pendang Perkara
- D-Docs & Publikasi
- Rasio Perkara Habis
- Rasio Perkara Parikera Pengant

STATISTIK PERKARA TK BANDING

Statistik Penanganan Perkara (Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara & Waktu Tertentu)

PILIH PERIODE YANG DITAMPAKAN

01/01/2025 s.d 31/12/2025

Tampilkan

Kembali

Petanda

Rasio Penanganan Perkara

98%

Pidana Biasa

Rasio Penanganan Perkara

99%

Pidana Tipikor

Rasio Penanganan Perkara

100%

Pidana Khusus Anak

Rasio Penanganan Perkara

100%

Belum Proses

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

266

Belum Proses

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

175

Belum Proses

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

21

Belum Proses

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

12

Sisa Perkara

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

4

Sisa Perkara

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

9

Sisa Perkara

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

8

Sisa Perkara

Sampai dengan tanggal 01/01/2025

Masuk Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

209

Masuk Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

143

Masuk Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

17

Masuk Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

11

Putus Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

138

Putus Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

149

Putus Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

25

Putus Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

11

Sisa Akhir Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

15

Sisa Akhir Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

3

Sisa Akhir Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

Sisa Akhir Perkara

Sampai dengan tanggal 31/12/2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA			BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1.1	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0
		Total		27	35	24	27	26	24	37	29	43	30	48	33
		Jumlah perkara yang diselesaikan	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA			BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1.2	PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0
		Total		27	35	24	27	26	24	37	29	43	30	48	33
		Jumlah perkara yang diputus	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA			BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1.3	PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN	Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0
		Total		27	35	24	27	26	24	37	29	43	30	48	33
		Jumlah Putusan yang telah di minutas	Pidana	18	16	10	10	8	4	13	13	23	5	22	18
			Perdata	4	14	13	17	17	19	24	15	15	20	25	15
			Tipikor	5	5	1	0	1	1	0	1	5	5	1	0

1.4	PERSENTASE PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING YANG MENGUNAKAN e- COURT	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		14	9	14	19	18	14	26	7	21	30	18	18
		Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan		14	9	14	19	18	14	26	7	22	30	18	18

1.5	PERSENTASE PERKARA PIDANA PADA TINGKAT BANDING YANG MENGUNAKAN e- BERPADU	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu	Pidana	0	1	8	6	9	8	7	17	18	11	24	11
			Tipikor	0	0	0	0	1	1	0	2	4	6	0	0
		Total		0	1	8	6	10	9	7	19	22	17	24	11
		Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan	Pidana	15	16	8	8	10	8	7	17	18	11	26	11
			Tipikor	2	1	0	0	1	1	0	2	4	6	0	0



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MANADO

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Elendi Koesoemah Almedja, Kima Atas, Kec. Mapangot
 Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,89 / 97,22%

Jumlah	41 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 24	
	PEREMPUAN : 17	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 2
	SMU : 2	S1 : 35
	Diploma 1 : 0	S2 : 2
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 3
	TNI : 2	WIRAUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 34	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? | 3,829 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,829 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,829 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Terhadap unsur terendah U1-Persyaratan, dilakukan tindak lanjut berupa publikasi Standar Layanan Pengadilan serta Alur Proses penanganan perkara, melalui banner, brosur, website dan media sosial.
2. Terhadap unsur terendah U3-Waktu Pelayanan, dilakukan tindak lanjut berupa pelatihan dan sosialisasi secara berkala melalui apel rutin kepada para petugas PTSP terkait SOP dan Standar Layanan.
3. Terhadap unsur terendah U4-Biaya/tarif, dilakukan tindak lanjut berupa publikasi Standar Layanan Pengadilan melalui banner, brosur, website dan media sosial bahwa biaya yang dikenakan pada layanan berbayar, misalnya biaya Salinan Berita Acara Sumpah Advokat dan Penanganan Perkara Perdata diselenggarakan secara resmi sesuai dengan peraturan/perundang – undangan yang berlaku

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

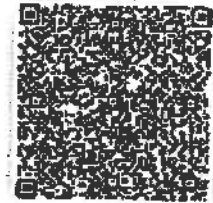


11 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi

(Signature)

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS

3,91 / 97,69%

Jumlah	: 36 Responden
Jenis Kelamin	: LAKI – LAKI : 23 PEREMPUAN : 13
Pendidikan	Tidak/Belum Sekolah: 0 Diploma 2: 0 SD: 0 Diploma 3: 1 SMP: 0 S1: 24 SMU: 9 S2: 0 Diploma 1: 0 S3: 2
Pekerjaan	PNS: 4 Swasta: 5 TNI: 0 Wirausaha: 0 POLRI: 1 Tenaga Kontrak: 0 Lainnya: 24

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,861 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? | 3,889 |
| 3. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? | 3,889 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Terhadap unsur U4 – Biaya/Tarif, dilakukan tindak lanjut berupa:
 - o melakukan publikasi secara berkala lewat website dan media sosial terkait layanan dan biaya/tarif resmi yang dikenakan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu untuk Biaya Perkara Perdata sebesar Rp 150.000,- dibayar pada PN Pengaju dan PNBSP Salinan Berita Acara Sumpah Advokat sebesar Rp 10.000,-lembar selalu diberikan kwitansi tanda terima
 - o melakukan sosialisasi kepada calon advokat yang akan diambil sumpahnya tentang besaran PNBSP Salinan Berita Acara Sumpah Advokat sebesar Rp 10.000,-lembar
2. Terhadap unsur U1 – Persyaratan, dilakukan tindak lanjut berupa: Berupaya selalu memberikan informasi layanan melalui publikasi Standar layanan Pengadilan serta alur proses penanganan perkara melalui website, media sosial, banner dan layar informasi
3. Terhadap unsur U2 – Prosedur, dilakukan tindak lanjut berupa:
 - o melakukan publikasi Standar layanan Pengadilan serta alur proses penanganan perkara melalui website, media sosial, banner dan layar informasi
 - o berupaya meningkatkan pemahaman Petugas PTSP tentang SOP layanan meja Kesekretariatan maupun meja Kepaniteraan dalam apel Senin pagi maupun waktu – waktu tertentu

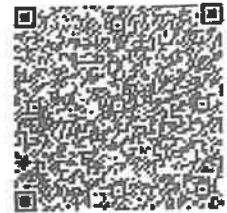
Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan.
Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.



Manado, 4 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT
NILAI INDEKS
3,75 / 93,79%

Jumlah 34 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 23
PEREMPUAN : 11
Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
SD : 0 Diploma 3 : 0
SMP : 0 S1 : 24
SMU : 3 S2 : 4
Diploma 1 : 0 S3 : 3
Pekerjaan PNS : 5 SWASTA : 10
TNI : 0 WIRAUUSAHA : 1
POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 1
LAINNYA : 17

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ? | 3,647 |
| 2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? | 3,676 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,706 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

- Tindak Lanjut terhadap unsur terendah U7 - Perilaku Pelaksana:
Berupaya meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap petugas layanan/petugas PTSP dalam memberikan pelayanan Prima yang mencerminkan Integritas dan Profesionalisme diwujudkan melalui prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) secara konsisten serta menerapkan komunikasi yang baik dan responsif terhadap pengguna layanan.
- Tindak Lanjut terhadap unsur terendah U2 - Prosedur:
Meningkatkan pemahaman Petugas PTSP tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan meja Kepaniteraan dan meja Kesekretariatan dalam briefing setiap hari Senin pagi maupun waktu-waktu tertentu serta berusaha melakukan publikasi Standar layanan Pengadilan serta alur proses penanganan perkara melalui website, media sosial, banner dan layar informasi di Pengadilan Tinggi Manado.
- Tindak Lanjut terhadap unsur terendah U3 - Waktu Pelayanan:
Petugas layanan/PTSP diberikan refreshment untuk memberikan layanan sesuai standar layanan dan SOP layanan yang telah ditetapkan dan terus berinovasi dan berusaha melakukan perbaikan pada prosedur pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Apabila tidak sesuai dengan standar layanan dan SOP layanan, maka kepada pengguna layanan diberikan kompensasi sesuai aturan yang berlaku.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan.
Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami
agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Manado, 6 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

AMIN SUTIKNO, SH., MH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soeiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas,
Kec. Mapangeli Sulawesi Utara
<https://www.pt-manado.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS**

3,92 / 97,89%

Jumlah	: 67 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	: 39
	PEREMPUAN	: 28
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah	: Diploma 2 : 0
	0	Diploma 3 : 8
	SD : 1	S1 : 50
	SMP : 1	S2 : 4
	SMU : 3	S3 : 0
	Diploma 1 : 0	
Pekerjaan	PNS : 21	SWASTA : 19
	TNI : 0	WIRASWASTA : 0
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 27	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan? 3.866
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan? 3.881
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? 3.896

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Unsur Produk, Spesifikasi, Jenis Pelayanan:

- Selalu membekali Petugas PTSP dengan product knowledge layanan, SOP layanan dan Standar layanan pada setiap briefing.
- Selalu mendorong petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya tentang produk, spesifikasi dan jenis layanan (termasuk aturan – aturan pendukungnya)

2. Unsur Sarana Prasarana:

- mengoptimalkan dan memastikan ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan dan pengunjung seperti wifi, minuman dan cemilan gratis.
- memberikan kompensasi layanan bagi pengguna layanan maupun pengunjung yang tidak memperoleh layanan sesuai standar yang diberikan

3. Unsur Biaya/tarif:

- melakukan publikasi secara berkala lewat website dan media sosial terkait layanan dan biaya/tarif resmi yang dikenakan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu untuk Biaya Perkara Perdata sebesar Rp 150.000,- dibayar pada PN Pengaju dan PNBP Salinan Berita Acara Sumpah Advokat sebesar Rp 10.000,-lembar selalu diberikan kwitansi tanda terima
- melakukan sosialisasi kepada calon advokat yang akan diambil sumpahnya tentang besaran PNBP Salinan Berita Acara Sumpah Advokat sebesar Rp 10.000,-/ Berita Acara

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Maafkan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.



Manado, 9 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi,

[Signature]

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu
Jalan Prof. Dr. Mr. Raden S.E. Koesoemah Atmadja Kima Atas Kec. Mapanget
Kota Manado, Sulawesi Utara 95259, www.pt-manado.go.id, ptmanadomari@gmail.com

**SURAT PERNYATAN MELAKUKAN
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Sutikno, S.H., M.H.
NIP : 196008011986121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Menyatakan bahwa :

Telah melakukan penginputan data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada secara manual dengan mengambil data melalui Aplikasi SIKEP dengan rincian jumlah hakim dan pegawai sebanyak 48 orang dari total 63 orang aparatur yang berada dilingkungan Pengadilan Tinggi Manado.

Data yang telah diinput pada lembar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tersebut adalah valid dan telah diperiksa sesuai kondisi yang sebenarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 5 Januari 2026

Ketua



AMIN SUTIKNO

INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025

NO	NAMA	KUAFIKASI	KOMPETENSI				KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
			Diklat Pim	Diklat Fungsional	Diklat Teknis 20 jp	Seminar / Workshop / Magang / Kursus / sejenisnya			
1	AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.	20	15		15	10	30	5	95
2	DEKY VELIX WAGIJU, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
3	IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
4	JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
5	MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
6	RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
7	MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
8	NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
9	VERRA LYNDA LIHAWA, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
10	Dr. DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.	25		15	15	10	30	2	97
11	R.A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.	20		15	15	10	30	5	95
12	DANARDONO, S.H., M.H.	20		15	15	10	30	5	95
13	Dr. YOGI ARSONO, S.H., K.N., M.H.	25		15	15	10	30	5	100
14	DAHLAN, S.E., S.H.	15	15		15	10	30	5	90
15	NIKSON LADJOMA, S.Sos., S.H.	15	15		0	10	30	5	75
16	IRIANY SIFAYUNG, S.H.	15	15		0	10	30	5	75
17	RONALD YAU, S.T.	15	15		15	10	30	5	90
18	MARTHEN MENDILA, S.H.	15	15		0	10	30	5	75
19	HERU PURWANTO, S.Kom.	15	15		15	10	30	5	90
20	ARWIN, S.H.	15	15		0	10	30	5	75
21	ELSJE DIANE RAMBI, S.H.	15	15		0	10	30	5	75
22	SERLY YU, S.Kom.	15	15		15	10	30	5	90
23	CHARLES ARTHUR SINAIL, S.E.	15	15		15	10	30	5	90
24	MUHAMMAD FADLY SYAM, S.Kom.	15	15		15		30	5	80
25	INDIKA SATRIYANA AGUSTA, S.Kom., S.H.	15	15		0	10	30	5	75

[illegible]



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran							Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispenasasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek						
1	12Desember	049	005	098312	PENGADILAN TINGGI MANADO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00		



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KEPN	Kode SA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Harian di DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontakual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	12Desember	048	006	088313	PENGADILAN TINGGI MANADO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 21/BUA.4/PL1.2/I/2026
Sifat : Terbatas
Hal : Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset
(IPA) pada Satuan Kerja selaku
Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

Jakarta, 13 Januari 2026

Yth. Para Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
Di tempat.

Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan
Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
tanggal 03 November 2025, bersama ini kami sampaikan Hasil Penilaian Indeks
Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja selaku Pengadilan Tingkat Banding Tahun
2025 pada tautan <https://bit.ly/IPATingkatBanding>.

Masa sanggah untuk satuan kerja selaku Pengadilan Tingkat Banding paling
lama 15 Januari 2026 dan dapat disampaikan kepada Bagian Bimbingan dan
Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Rosyidatus Syarifeini

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.



**MATRIKS REKAPITULASI
INDEKS PENGELOLAAN ASSET (IPA)
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2025**

NO	Kode Wilayah	KODE SATKER	NAMA SATKER	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	PARAMETER 4	PARAMETER 5	PARAMETER 6	PARAMETER 7	NILAI IPA
1	0100	097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	0,80	0,38	0,83	0,40	0,20	0,40	0,40	3,40
2	0100	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	0,80	0,15	0,83	0,40	0,40	0,20	0,40	3,18
3	0100	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	0,80	0,45	0,75	0,20	0,30	0,40	0,40	3,30
4	0100	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI JAKARTA	0,80	0,45	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,48
5	0300	097713	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	0,80	0,38	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,30
6	0300	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	0,80	0,30	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,23
7	0400	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	0,80	0,38	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,30
8	0400	547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA D.I.YOGYAKARTA	0,80	0,38	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,40
9	0500	098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	0,80	0,38	0,83	0,40	0,30	0,10	0,30	3,10
10	0500	308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	0,80	0,45	0,83	0,40	0,30	0,40	0,40	3,58
11	0500	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	0,80	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
12	0500	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI HI SURABAYA	0,80	0,45	0,83	0,20	0,20	0,40	0,40	3,28
13	0700	098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	0,80	0,60	0,75	0,40	0,30	0,40	0,40	3,65
14	0700	401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	0,80	0,30	0,83	0,20	0,10	0,40	0,40	3,03
15	0700	526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	0,68	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,21
16	0700	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN	0,80	0,38	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,60
17	0900	400492	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	0,80	0,38	0,83	0,30	0,10	0,40	0,40	3,20
18	0900	402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	0,80	0,30	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,53
19	1000	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	0,80	0,53	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,75
20	1000	547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	0,80	0,45	0,83	0,20	0,10	0,40	0,30	3,08
21	1100	098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	0,80	0,38	0,80	0,30	0,10	0,40	0,40	3,18
22	1100	402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	0,80	0,15	0,80	0,20	0,30	0,40	0,40	3,05
23	1200	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	0,64	0,45	0,83	0,20	0,10	0,40	0,40	3,02
24	1200	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	0,80	0,30	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40	3,10
25	1300	400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	0,80	0,60	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,63
26	1300	402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	0,80	0,38	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,40
27	1400	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	0,80	0,53	0,83	0,40	0,20	0,40	0,20	3,35
28	1400	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA	0,80	0,30	0,83	0,10	0,40	0,40	0,40	3,23
29	1500	099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	0,80	0,30	0,75	0,20	0,40	0,40	0,40	3,25
30	1500	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	0,80	0,38	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,60
31	1500	526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	0,68	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,21
32	1600	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	0,80	0,38	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,60
33	1600	402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	0,80	0,38	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,30
34	1700	099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	0,80	0,45	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,68
35	1700	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	0,80	0,30	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,53
36	1700	526734	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	0,80	0,30	0,73	0,20	0,40	0,40	0,40	3,23
37	1100	526728	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	0,80	0,30	0,80	0,20	0,40	0,40	0,40	3,30
38	1800	400534	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	0,80	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
39	1800	576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	0,80	0,30	0,75	0,40	0,30	0,40	0,40	3,35
40	1900	307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	0,80	0,38	0,85	0,40	0,10	0,40	0,40	3,33
41	1900	099418	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	0,68	0,15	0,83	0,20	0,40	0,40	0,30	2,96
42	1900	526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	0,80	0,30	0,83	0,20	0,10	0,40	0,40	3,03
43	2000	400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	0,56	0,30	0,75	0,20	0,30	0,40	0,40	2,91

MATRIS REKAPITULASI
INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
PAOA PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2025

NO	Kode Wilayah	KODE SATKER	NAMA SATKER	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	PARAMETER 4	PARAMETER 5	PARAMETER 6	PARAMETER 7	NILAI IPA
44	2000	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	0,68	0,15	0,83	0,20	0,20	0,40	0,40	2,86
45	2100	099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	0,80	0,38	0,83	0,20	0,20	0,40	0,40	3,20
46	2100	402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	0,80	0,30	0,75	0,20	0,30	0,40	0,40	3,15
47	2200	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	0,80	0,38	0,75	0,40	0,40	0,40	0,40	3,53
48	2200	526724	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	0,80	0,45	0,75	0,20	0,40	0,10	0,40	3,10
49	2300	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0,80	0,38	0,75	0,40	0,20	0,40	0,40	3,33
50	2300	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	0,80	0,45	0,75	0,40	0,40	0,40	0,40	3,60
51	2300	526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	0,80	0,45	0,75	0,40	0,40	0,40	0,10	3,30
52	2400	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	0,80	0,30	0,83	0,20	0,20	0,40	0,40	3,13
53	2400	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	0,80	0,15	0,85	0,40	0,40	0,40	0,40	3,40
54	2500	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	0,80	0,30	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,53
55	2500	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	0,80	0,38	0,83	0,20	0,30	0,30	0,40	3,20
56	2600	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	0,80	0,38	0,83	0,30	0,30	0,40	0,40	3,40
57	2600	576274	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	0,80	0,38	0,60	0,40	0,10	0,40	0,40	3,08
58	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	0,80	0,45	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,48
59	3400	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	0,80	0,38	0,75	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
60	3500	526720	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	0,68	0,45	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,36
61	3500	526722	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	0,80	0,30	0,75	0,40	0,40	0,40	0,40	3,45
62	2800	440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUT	0,80	0,15	0,83	0,20	0,20	0,40	0,20	2,78
63	2800	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	0,80	0,15	0,75	0,40	0,40	0,30	0,40	3,20
64	2900	440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	0,80	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
65	2900	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	0,80	0,38	0,83	0,40	0,40	0,30	0,40	3,50
66	3000	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,80	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
67	3000	663403	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,80	0,38	0,83	0,40	0,40	0,40	0,40	3,60
68	3100	440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	0,80	0,30	0,83	0,40	0,30	0,40	0,40	3,43
69	3100	664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	0,80	0,15	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,08
70	0600	098434	PENGADILAN TINGGI BANDARA ACEH	0,80	0,23	0,83	0,40	0,30	0,30	0,40	3,25
71	0600	401582	MAKAMAH SYAR'IAH ACEH	0,80	0,30	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,23
72	3200	526706	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	0,80	0,45	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40	3,25
73	3200	526708	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	0,80	0,30	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,33
74	3300	526716	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	0,80	0,45	0,75	0,20	0,40	0,40	0,10	3,10
75	3300	526718	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	0,68	0,45	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40	3,13
76	0200	097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	0,80	0,15	0,83	0,20	0,40	0,40	0,40	3,18
77	0200	308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	0,80	0,60	0,75	0,20	0,40	0,40	0,40	3,55
78	0800	098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	0,80	0,45	0,83	0,40	0,10	0,40	0,40	3,38
79	0800	401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	0,80	0,30	0,83	0,40	0,30	0,40	0,40	3,43

Note: 1. Rata-rata IPA Tingkat Banding adalah 3,30
2. Terdapat 4 Pengadilan Tingkat Banding yang tidak mencapai Target
IPA Tahun 2025 (Target IPA Tahun 2025 sebesar 3,00) yaitu:
Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan
Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
PADA PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025**

No	Parameter		Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2		3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
	1.1	Penatausahaan BMN					Bobot	Indeks sebelum bobot	0,8
							20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi yang Telah di Verifikasi	Jumlah transaksi			Bobot	Indeks sebelum bobot	2,4
			13	13	100%	-	60%	4	
	1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan	Jumlah data telaah			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,6
			1	1	100%	-	40%	4	
	1.2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset					Bobot		0,45
							15%		
	1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			Bobot	Indeks sebelum bobot	1
			25.369.500	52.315.000	48,5%		50%	2	
	1.2.2	Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN			Bobot	Indeks sebelum bobot	2
			25.369.500	26.063.500	97,3%		50%	4	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
	2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,825
							25%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,2
			30 July 2025	8 Agustus 2025	≤ H-3	4	30%	4	
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	0,9
							30%	3	
	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,2
			15 Januari 2025	16 Januari 2025	3	3	40%	3	
			4 Juli 2025	7 Juli 2025	3	3			
3.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif								
	3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut	Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,4
			4	4	100%		10%	4	
	3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal	(57)		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,4
			15.000.000	-	akhir t-0 > awal t-0	-	10%	4	

4.	Administrasi BMN yang Andal								
		BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
			64.784	64.784	100%		10%	4	
	4.1	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP	Total Nilai Perolehan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
			143.097.615.093	143.084.483.093	100%		10%	4	
Nilai IPA									3,675

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	21,616,040,000	0	19,920,271,032	1,563,091,807	21,483,362,839	99.39 %	132,677,161
WA Program Dukungan Manajemen	21,616,040,000	0	19,920,271,032	1,563,091,807	21,483,362,839	99.39 %	132,677,161
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	376,452,000	0	363,500,000	12,432,000	375,932,000	99.86 %	520,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	376,452,000	0	363,500,000	12,432,000	375,932,000	99.86 %	520,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	376,452,000	0	363,500,000	12,432,000	375,932,000	99.86 %	520,000
051 Pengadaan kendaraan bermotor	363,500,000	0	363,500,000	0	363,500,000	100.00	0
051.OA PENGADAAN KENDARAAN DINAS	363,500,000	0	363,500,000	0	363,500,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363,500,000	0	363,500,000	0	363,500,000	100.00	0
000001. Kendaraan Roda 4	363,500,000	0	363,500,000	0	363,500,000	100.00	0
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	12,952,000	0	0	12,432,000	12,432,000	95.99 %	520,000
052.OA Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12,952,000	0	0	12,432,000	12,432,000	95.99 %	520,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,952,000	0	0	12,432,000	12,432,000	95.99 %	520,000
000187. Kamera Konferensi	12,952,000	0	0	12,432,000	12,432,000	95.99 %	520,000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	21,239,588,000	0	19,556,771,032	1,550,659,807	21,107,430,839	99.38 %	132,157,161
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	21,239,288,000	0	19,556,471,032	1,550,659,807	21,107,130,839	99.38 %	132,157,161
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
051.OA PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
000155. Printer	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	21,238,588,000	0	19,555,771,032	1,550,659,807	21,106,430,839	99.38 %	132,157,161
001 Gaji dan Tunjangan	18,119,707,000	0	16,699,132,809	1,301,569,483	18,000,702,292	99.34 %	119,004,708
001.OA Pembayaran gaji dan tunjangan	18,119,707,000	0	16,699,132,809	1,301,569,483	18,000,702,292	99.34 %	119,004,708
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,451,826,000	0	3,194,747,360	251,787,200	3,446,534,560	99.85 %	5,291,440
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	2,974,350,000	0	2,717,271,840	251,787,200	2,969,059,040	99.82 %	5,290,960

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 2 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	239,019,000	0	239,018,960	0	239,018,960	100.00	40
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	238,457,000	0	238,456,560	0	238,456,560	100.00	440
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,000	0	34,940	2,374	37,314	95.68 %	1,686
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,000	0	29,348	2,374	31,722	96.13 %	1,278
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	3,000	0	2,744	0	2,744	91.47 %	256
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	3,000	0	2,848	0	2,848	94.93 %	152
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	232,703,000	0	216,131,132	16,425,152	232,556,284	99.94 %	146,716
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	200,200,000	0	183,659,982	16,425,152	200,085,134	99.94 %	114,866
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	16,203,000	0	16,202,290	0	16,202,290	100.00	710
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	16,300,000	0	16,268,860	0	16,268,860	99.81 %	31,140
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	45,566,000	0	41,610,382	3,364,904	44,975,286	98.70 %	590,714
000011. Belanja Tunj. Anak PNS	39,497,000	0	35,542,364	3,364,904	38,907,268	98.51 %	589,732
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	3,031,000	0	3,030,926	0	3,030,926	100.00	74
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	3,038,000	0	3,037,092	0	3,037,092	99.97 %	908
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	94,410,000	0	87,705,000	6,705,000	94,410,000	100.00	0
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	81,000,000	0	74,295,000	6,705,000	81,000,000	100.00	0
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	100.00	0
000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	158,260,000	0	144,760,000	13,490,000	158,250,000	99.99 %	10,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	138,860,000	0	125,360,000	13,490,000	138,850,000	99.99 %	10,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	100.00	0
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	34,813,000	0	22,197,066	11,548,047	33,745,113	96.93 %	1,067,887
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	17,000,000	0	4,385,017	11,548,047	15,933,064	93.72 %	1,066,936
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	9,003,000	0	9,002,787	0	9,002,787	100.00	213
000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	8,810,000	0	8,809,262	0	8,809,262	99.99 %	738

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 3 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	122,495,000	0	113,120,040	8,835,240	121,955,280	99.56 %	539,720
	000023. Belanja Tunj Beras PNS	122,495,000	0	113,120,040	8,835,240	121,955,280	99.56 %	539,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	442,260,000	0	363,265,000	73,970,000	437,235,000	98.86 %	5,025,000
	000024. Belanja Uang Makan PNS	442,260,000	0	363,265,000	73,970,000	437,235,000	98.86 %	5,025,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	34,675,000	0	31,540,000	2,395,000	33,935,000	97.87 %	740,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	30,430,000	0	27,295,000	2,395,000	29,690,000	97.57 %	740,000
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,215,000	0	2,215,000	0	2,215,000	100.00	0
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	244,350,000	0	222,750,000	21,600,000	244,350,000	100.00	0
	000028. Tunjangan Kemahalan Hakim	244,350,000	0	222,750,000	21,600,000	244,350,000	100.00	0
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	709,500,000	0	659,500,000	50,000,000	709,500,000	100.00	0
	000029. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc Tipikor	600,000,000	0	550,000,000	50,000,000	600,000,000	100.00	0
	000030. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc (THR dan gaji ke-13)	109,500,000	0	109,500,000	0	109,500,000	100.00	0
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,400,211,000	0	2,234,953,126	67,176,290	2,302,129,416	95.91 %	98,081,584
	000160. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 14)	250,700,000	0	250,635,811	0	250,635,811	99.97 %	64,189
	000161. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 13)	259,546,000	0	259,545,465	0	259,545,465	100.00	535
	000162. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	1,889,965,000	0	1,724,771,850	67,176,290	1,791,948,140	94.81 %	98,016,860
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	9,861,810,000	0	9,137,400,000	717,700,000	9,855,100,000	99.93 %	6,710,000
	000157. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	708,600,000	0	708,600,000	0	708,600,000	100.00	0
	000158. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	690,000,000	0	690,000,000	0	690,000,000	100.00	0
	000159. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	8,463,210,000	0	7,738,800,000	717,700,000	8,456,500,000	99.92 %	6,710,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	193,133,000	0	160,714,900	32,415,900	193,130,800	100.00	2,200
	000031. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	6,408,000	0	6,407,200	0	6,407,200	99.99 %	800
	000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	6,408,000	0	6,407,200	0	6,407,200	99.99 %	800
	000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	180,317,000	0	147,900,500	32,415,900	180,316,400	100.00	600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 4 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	3,821	930	4,751	67.87 %	2,249
	000034. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	96	0	96	9.60 %	904
	000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	96	0	96	9.60 %	904
	000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	3,629	930	4,559	91.18 %	441
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,839,000	0	8,893,010	1,906,550	10,799,560	99.64 %	39,440
	000037. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	321,000	0	320,360	0	320,360	99.80 %	640
	000038. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	321,000	0	320,360	0	320,360	99.80 %	640
	000039. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	10,197,000	0	8,252,290	1,906,550	10,158,840	99.63 %	38,160
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,011,000	0	2,570,012	433,556	3,003,568	99.75 %	7,432
	000040. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	129,000	0	128,144	0	128,144	99.34 %	856
	000041. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	129,000	0	128,144	0	128,144	99.34 %	856
	000042. Belanja Tunj. Anak PPPK	2,753,000	0	2,313,724	433,556	2,747,280	99.79 %	5,720
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,840,000	0	13,780,000	1,060,000	14,840,000	100.00	0
	000043. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	100.00	0
	000044. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	100.00	0
	000045. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	12,720,000	0	11,660,000	1,060,000	12,720,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,443,000	0	9,487,020	1,955,340	11,442,360	99.99 %	640
	000046. Belanja Tunj. Beras PPPK	11,443,000	0	9,487,020	1,955,340	11,442,360	99.99 %	640
511628	Belanja Uang Makan PPPK	46,296,000	0	28,555,000	16,993,000	45,548,000	98.38 %	748,000
	000047. Belanja Uang Makan PPPK	46,296,000	0	28,555,000	16,993,000	45,548,000	98.38 %	748,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,220,000	0	5,415,000	1,805,000	7,220,000	100.00	0
	000183. Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,220,000	0	5,415,000	1,805,000	7,220,000	100.00	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,118,881,000	0	2,856,638,223	249,090,324	3,105,728,547	99.58 %	13,152,453
002.0A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1,040,641,000	0	920,986,384	118,014,292	1,039,000,676	99.84 %	1,640,324
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	930,201,000	0	817,976,741	110,618,232	928,594,973	99.83 %	1,606,027
	000048. Keperluan Rumah Tangga Kantor	57,132,000	0	53,511,361	2,448,660	55,960,021	97.95 %	1,171,979

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 5 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000049. Jasa Outsourcing Kebersihan dan Keamanan Kawasan Pengadilan Terpadu Manado	388,752,000	0	323,803,522	64,760,864	388,564,386	99.95 %	187,614
	000050. Jamuan Tamu	35,553,000	0	28,143,863	7,360,210	35,504,073	99.86 %	48,927
	000051. Satpam	67,824,000	0	67,824,000	0	67,824,000	100.00	0
	000052. THR Satpam	8,478,000	0	8,478,000	0	8,478,000	100.00	0
	000053. Pengemudi	135,648,000	0	135,648,000	0	135,648,000	100.00	0
	000054. THR Pengemudi	16,956,000	0	16,956,000	0	16,956,000	100.00	0
	000055. Pramubhakti	123,328,000	0	123,328,000	0	123,328,000	100.00	0
	000056. THR Pramubhakti	15,416,000	0	15,416,000	0	15,416,000	100.00	0
	000057. Air Minum Galon Untuk Ruang Tamu Terbuka/PTSP/Pimpinan/Pegawai	6,804,000	0	4,867,995	1,739,998	6,607,993	97.12 %	196,007
	000165. Jasa Outsourcing Keamanan Gedung Kantor Lama	60,000,000	0	40,000,000	20,000,000	60,000,000	100.00	0
	000191. Jasa Kebersihan	14,310,000	0	0	14,308,500	14,308,500	99.99 %	1,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,800,000	0	2,775,000	0	2,775,000	99.11 %	25,000
	000058. Spanduk/Banner	2,800,000	0	2,775,000	0	2,775,000	99.11 %	25,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	107,640,000	0	100,234,643	7,396,060	107,630,703	99.99 %	9,297
	000059. Keperluan Sehari-hari kantor	107,640,000	0	100,234,643	7,396,060	107,630,703	99.99 %	9,297
002.0B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	872,293,000	0	835,760,456	28,370,060	864,130,516	99.06 %	8,162,484
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	189,853,000	0	158,008,916	28,280,860	186,289,776	98.12 %	3,563,224
	000060. Langganan Internet	185,580,000	0	153,772,902	28,280,860	182,053,762	98.10 %	3,526,238
	000061. Lisensi Video Conference	3,150,000	0	3,137,344	0	3,137,344	99.60 %	12,656
	000163. Langganan Canva Pro	770,000	0	769,000	0	769,000	99.87 %	1,000
	000164. Langganan Cloud Storage	353,000	0	329,670	0	329,670	93.39 %	23,330
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,800,000	0	13,225,540	67,000	13,292,540	74.68 %	4,507,460
	000062. Biaya Pengiriman Surat	17,800,000	0	13,225,540	67,000	13,292,540	74.68 %	4,507,460
522112	Belanja Langganan Telepon	300,000	0	222,000	22,200	244,200	81.40 %	55,800
	000063. Langganan Telepon	300,000	0	222,000	22,200	244,200	81.40 %	55,800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 6 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141	Belanja Sewa	664,340,000	0	664,304,000	0	664,304,000	99.99 %	36,000
	000064. Sewa Mesin Fotocopy	658,140,000	0	658,104,000	0	658,104,000	99.99 %	36,000
	000065. Sewa Web Hosting	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	100.00	0
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	766,506,000	0	720,805,676	44,044,162	764,849,838	99.78 %	1,656,162
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	360,337,000	0	351,817,240	8,365,275	360,182,515	99.96 %	154,485
	000066. Pemeliharaan gedung kantor baru	285,063,000	0	276,599,940	8,365,275	284,965,215	99.97 %	97,785
	000067. Pemeliharaan gedung kantor lama	41,616,000	0	41,613,900	0	41,613,900	99.99 %	2,100
	000068. Halaman gedung kantor	10,630,000	0	10,589,400	0	10,589,400	99.62 %	40,600
	000166. Pemeliharaan Pos Jaga Pengadilan Terpadu (1)	4,396,000	0	4,396,000	0	4,396,000	100.00	0
	000167. Pemeliharaan Pos Jaga Pengadilan Terpadu (2)	4,082,000	0	4,082,000	0	4,082,000	100.00	0
	000168. Pemeliharaan Pagar Pengadilan Terpadu	14,550,000	0	14,536,000	0	14,536,000	99.90 %	14,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	165,375,000	0	165,370,575	0	165,370,575	100.00	4,425
	000069. Rumah Dinas (11 unit)	165,375,000	0	165,370,575	0	165,370,575	100.00	4,425
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,794,000	0	203,617,861	35,678,887	239,296,748	99.38 %	1,497,252
	000070. Kendaraan Bermotor Roda 4	95,500,000	0	88,495,991	6,999,623	95,495,614	100.00	4,386
	000071. Genset	16,000,000	0	10,543,304	5,383,500	15,926,804	99.54 %	73,196
	000072. BBM untuk Kendaraan Pinjam Pakai dari Pemprov Sulut	23,410,000	0	21,213,170	1,640,414	22,853,584	97.62 %	556,416
	000073. BBM untuk Kendaraan Dinas Sewa dari Biro Umum	48,300,000	0	42,780,359	4,804,550	47,584,909	98.52 %	715,091
	000074. BBM Sewa Haice	2,252,000	0	2,251,387	0	2,251,387	99.97 %	613
	000075. Kendaraan Bermotor Roda 2	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000
	000076. PC	5,840,000	0	5,840,000	0	5,840,000	100.00	0
	000077. Laptop/Notebook	5,700,000	0	5,647,800	0	5,647,800	99.08 %	52,200
	000078. Printer	2,602,000	0	2,600,000	0	2,600,000	99.92 %	2,000
	000079. AC Split	12,200,000	0	12,198,900	0	12,198,900	99.99 %	1,100
	000080. AC Standing	3,050,000	0	3,046,950	0	3,046,950	99.90 %	3,050
	000081. Bahan Bakar Genset	10,000,000	0	9,000,000	1,000,000	10,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 7 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000192. AC Central	15,860,000	0	0	15,850,800	15,850,800	99.94 %	9,200
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	137,200,000	0	123,439,951	13,760,000	137,199,951	100.00	49
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	54,640,000	0	54,639,951	0	54,639,951	100.00	49
	000082. Pakaian Dinas CPNS	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
	000083. Pakaian Dinas PPPK	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
	000084. Pakaian Dinas Hakim	12,750,000	0	12,749,987	0	12,749,987	100.00	13
	000085. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	33,150,000	0	33,149,971	0	33,149,971	100.00	29
	000086. Pakaian Dinas untuk PPNPN	6,190,000	0	6,189,993	0	6,189,993	100.00	7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,560,000	0	68,800,000	13,760,000	82,560,000	100.00	0
	000088. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	21,600,000	0	18,000,000	3,600,000	21,600,000	100.00	0
	000089. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	21,000,000	0	17,500,000	3,500,000	21,000,000	100.00	0
	000090. Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)	9,000,000	0	7,500,000	1,500,000	9,000,000	100.00	0
	000091. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	6,600,000	1,320,000	7,920,000	100.00	0
	000092. Honor Staf Pengelola Keuangan	11,760,000	0	9,800,000	1,960,000	11,760,000	100.00	0
	000093. Honor Pengelola PNBPN	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
	000094. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil)	4,800,000	0	4,000,000	800,000	4,800,000	100.00	0
	000095. Honor Pengurus/Penyimpan BMN	2,880,000	0	2,400,000	480,000	2,880,000	100.00	0
002.0E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc	116,280,000	0	116,280,000	0	116,280,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	116,280,000	0	116,280,000	0	116,280,000	100.00	0
	000096. Bantuan Sewa Rumah Dinas	116,280,000	0	116,280,000	0	116,280,000	100.00	0
002.0F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
	000097. Jasa Rohaniawan	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
002.0G	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT PERTAMA	176,561,000	0	129,965,756	44,901,810	174,867,566	99.04 %	1,693,434
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162,751,000	0	116,165,756	44,901,810	161,067,566	98.97 %	1,683,434

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 8 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000099. Uang Harian	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000101. Transpot Riil	3,709,000	0	2,209,000	1,363,340	3,572,340	96.32 %	136,660
000102. Penginapan	28,100,000	0	19,199,834	8,320,000	27,519,834	97.94 %	580,166
000103. Tiket	69,113,000	0	41,691,972	26,528,470	68,220,442	98.71 %	892,558
000104. Uang Harian	23,320,000	0	15,370,000	7,950,000	23,320,000	100.00	0
000105. Uang Representasi	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000109. Transpot Riil	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000110. Uang Harian (PN Tondano)	1,850,000	0	1,110,000	740,000	1,850,000	100.00	0
000111. Uang Representasi (PN Tondano)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000112. Sopir (PN Tondano)	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000114. Uang Harian (PN Bitung)	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000115. Uang Representasi (PN Bitung)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000116. Sopir (PN Bitung)	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000118. Uang Harian (PN Amurang)	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	100.00	0
000119. Uang Representasi (PN Amurang)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000120. Penginapan	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000121. Sopir (PN Amurang)	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000123. Uang Harian (PN Airmadidi)	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000124. Uang Representasi (PN Airmadidi)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000125. Sopir (PN Airmadidi)	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000127. Uang Harian (PN Kotamobagu)	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000128. Uang Representasi (PN Kotamobagu)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000129. Sopir (PN Kotamobagu)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000130. Uang Penginapan Pimpinan (PN Kotamobagu)	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000131. Tiket	5,765,000	0	5,764,680	0	5,764,680	99.99 %	320
000132. Uang Penginapan (PN Kotamobagu)	880,000	0	875,000	0	875,000	99.43 %	5,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 9 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000134. Uang Harian (PN Tahuna)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
	000135. Uang Representasi (PN Tahuna)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000136. Uang Penginapan Pimpinan (PN Tahuna)	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
	000137. Uang Penginapan (PN Tahuna)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000138. Tiket PP (PN Tahuna)	2,944,000	0	2,943,500	0	2,943,500	99.98 %	500
	000140. Uang Harian (PN Melonguane)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
	000141. Uang Representasi (PN Melonguane)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000142. Uang Harian	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000143. Uang Penginapan Pimpinan (PN Melonguane)	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00	0
	000144. Uang Penginapan (PN Melonguane)	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000	100.00	0
	000145. Tiket PP (PN Melonguane)	4,712,000	0	4,711,770	0	4,711,770	100.00	230
	000147. Transpot Riil	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000148. Penginapan	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000149. Tiket	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,810,000	0	13,800,000	0	13,800,000	99.93 %	10,000
	000150. Uang Saku Pengawasan PN Manado	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000151. Uang Representasi Pengawasan PN Manado	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000152. Transport Lokal	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100.00	0
	000153. Transport Lokal Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan SAIBA	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
002.0H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
	000154. Transport Lokal	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
051.0A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
	000156. Penjilidan Dokumen SAKIP	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 099313 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	167,522,000	0	152,540,757	12,699,750	165,240,507	98.64 %	2,281,493
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	167,522,000	0	152,540,757	12,699,750	165,240,507	98.64 %	2,281,493
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	167,522,000	0	152,540,757	12,699,750	165,240,507	98.64 %	2,281,493
AEA Koordinasi	94,275,000	0	86,090,470	8,068,750	94,159,220	99.88 %	115,780
AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	69,275,000	0	61,090,470	8,068,750	69,159,220	99.83 %	115,780
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	69,275,000	0	61,090,470	8,068,750	69,159,220	99.83 %	115,780
052.0A Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding	69,275,000	0	61,090,470	8,068,750	69,159,220	99.83 %	115,780
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,775,000	0	60,190,470	7,468,750	67,659,220	99.83 %	115,780
000004. Uang Harian (PN Airmadidi)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
000005. Uang Sopir (PN Airmadidi)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000007. Uang Harian (PN Kotamobagu)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
000008. Uang Sopir (PN Kotamobagu)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000009. Uang Penginapan (PN Kotamobagu)	2,815,000	0	2,815,000	0	2,815,000	100.00	0
000011. Uang Harian (PN Tahuna)	4,470,000	0	4,440,000	0	4,440,000	99.33 %	30,000
000012. Tiket (PN Tahuna)	3,010,000	0	3,005,500	0	3,005,500	99.85 %	4,500
000013. Uang Harian (PN Tondano)	4,070,000	0	3,700,000	370,000	4,070,000	100.00	0
000014. Uang Penginapan (PN Tahuna)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000016. Uang Harian (PN Melonguane)	4,470,000	0	4,440,000	0	4,440,000	99.33 %	30,000
000017. Uang Penginapan (PN Melonguane)	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000	100.00	0
000018. Tiket (PN Melonguane)	4,713,000	0	4,711,770	0	4,711,770	99.97 %	1,230
000020. Konsultasi DIPA 03	16,367,000	0	11,598,200	4,718,750	16,316,950	99.69 %	50,050
000021. Uang Sopir (PN Tondano)	750,000	0	300,000	450,000	750,000	100.00	0
000023. Uang Harian (PN Bitung)	5,180,000	0	3,700,000	1,480,000	5,180,000	100.00	0
000024. Uang Sopir (PN Bitung)	750,000	0	300,000	450,000	750,000	100.00	0
000026. Uang Harian (PN Amurang)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 099313 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000027. Uang Sopir (PN Amurang)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	900,000	600,000	1,500,000	100.00	0
000029. Uang Harian	1,500,000	0	900,000	600,000	1,500,000	100.00	0
AEA.003 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Koordinasi	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
051.0A Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
000001. Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	73,247,000	0	66,450,287	4,631,000	71,081,287	97.04 %	2,165,713
BCA.U06 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	60,398,000	0	54,886,127	4,223,000	59,109,127	97.87 %	1,288,873
051 Pengiriman surat penahanan.	12,800,000	0	12,142,407	552,500	12,694,907	99.18 %	105,093
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,800,000	0	12,142,407	552,500	12,694,907	99.18 %	105,093
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,800,000	0	12,142,407	552,500	12,694,907	99.18 %	105,093
000034. Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan/Penetapan Penahanan	12,800,000	0	12,142,407	552,500	12,694,907	99.18 %	105,093
052 Pencatatan register perkara banding	33,148,000	0	32,712,700	434,000	33,146,700	100.00	1,300
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	33,148,000	0	32,712,700	434,000	33,146,700	100.00	1,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,148,000	0	32,712,700	434,000	33,146,700	100.00	1,300
000035. Alat Tulis kantor	33,148,000	0	32,712,700	434,000	33,146,700	100.00	1,300
053 Pemberitahuan registrasi berkas perkara banding ke pengadilan pengaju	7,910,000	0	6,300,000	1,600,000	7,900,000	99.87 %	10,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,910,000	0	6,300,000	1,600,000	7,900,000	99.87 %	10,000
521211 Belanja Bahan	7,910,000	0	6,300,000	1,600,000	7,900,000	99.87 %	10,000
000036. Penjilidan Berkas Perkara	7,910,000	0	6,300,000	1,600,000	7,900,000	99.87 %	10,000
054 Minutasi	6,540,000	0	3,731,020	1,636,500	5,367,520	82.07 %	1,172,480
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,540,000	0	3,731,020	1,636,500	5,367,520	82.07 %	1,172,480
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,540,000	0	3,731,020	1,636,500	5,367,520	82.07 %	1,172,480

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 099313 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000037. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju	6,540,000	0	3,731,020	1,636,500	5,367,520	82.07 %	1,172,480
BCA.U07 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	12,849,000	0	11,564,160	408,000	11,972,160	93.18 %	876,840
051 Pengiriman surat penahanan.	1,360,000	0	1,003,400	0	1,003,400	73.78 %	356,600
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,360,000	0	1,003,400	0	1,003,400	73.78 %	356,600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,360,000	0	1,003,400	0	1,003,400	73.78 %	356,600
000030. Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan/Penetapan Penahanan	1,360,000	0	1,003,400	0	1,003,400	73.78 %	356,600
052 Pencatatan register perkara banding	7,220,000	0	6,792,500	408,000	7,200,500	99.73 %	19,500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,220,000	0	6,792,500	408,000	7,200,500	99.73 %	19,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,220,000	0	6,792,500	408,000	7,200,500	99.73 %	19,500
000031. Alat Tulis Kantor	7,220,000	0	6,792,500	408,000	7,200,500	99.73 %	19,500
053 Pemberitahuan registrasi berkas perkara banding ke pengadilan pengaju	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
000032. Penjilidan Berkas Perkara	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
054 Minutasi	1,419,000	0	918,260	0	918,260	64.71 %	500,740
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,419,000	0	918,260	0	918,260	64.71 %	500,740
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,419,000	0	918,260	0	918,260	64.71 %	500,740
000033. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju	1,419,000	0	918,260	0	918,260	64.71 %	500,740

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir